



**PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 63 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN
2018-2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2019**



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018-2023

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus, perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Handwritten signature and initials

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

h v 131

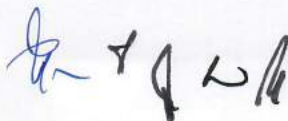
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Handwritten signature/initials

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
29. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018-2023.






Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 35) yang mengatur Sekretariat Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS : BIDAN	
4.	KEPALA BAGIAN/KANTOR/BIDANG	
5.	BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Desember 2019

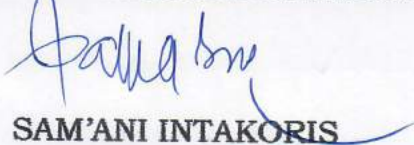
**Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,**



HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KUDUS TAHUN 2018-2023

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018-2023



[Handwritten signature]

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Sekretariat Daerah selama lima tahun yang akan datang. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus tahun 2018-2023.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Kudus pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus di masa yang akan datang pada khususnya.

Kudus, 2019
Sekretaris Daerah



Dr. Ars. SAM'ANI INTAKORIS, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19690721 199703 1 005

7/12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus, didasarkan pada rasionalitas kebutuhan guna menjawab perubahan lingkungan yang selalu dinamis, dan sekaligus adanya suatu keinginan agar mampu menjadi fasilitator dari suatu perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Untuk terwujudnya hal ini diperlukan Visi dan Misi dengan memperhatikan dinamika perubahan yang terjadi dan kecenderungan arah perubahan masa depan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah, dibutuhkan pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan selama 5 (lima) tahun yang disebut Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Renstra merupakan suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui strategi dan kebijakan yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 tahun, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. Penyusunan Renstra digunakan untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya, yang diperkirakan akan timbul pada 5 tahun ke depan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik lingkungan strategis di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten Kudus menindaklanjuti Permendagri tersebut dengan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus. Sesuai ketentuan diatas, terdapat beberapa perubahan SOTK serta tugas pokok dan fungsi beberapa bagian di Sekretariat Daerah. Perubahan tugas pokok dan fungsi mempengaruhi indikator kegiatan yang pada masing-masing bagian dan indikator kegiatan utama Setda. Oleh karena itu dibutuhkan Perubahan Renstra Setda Kabupaten Kudus guna merespon perubahan indikator kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus.

816

1.2. Landasan Hukum

Perubahan Renstra Setda Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 mengacu pada peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- h. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- i. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- j. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- k. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- l. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- m. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- n. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- o. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

- x. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- z. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
- aa. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- bb. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- cc. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- dd. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- ff. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
- gg. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029;
- hh. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023;
- ii. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus;
- jj. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;
- kk. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032;
- ll. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- mm. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023.

19

1.3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Penyusunan dan Penerapan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus untuk Tahun 2018-2023 ini dimaksudkan untuk :

1. Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang ke sekretariatan daerah.
2. Mendorong tercapainya sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun ke depan.
3. Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.
4. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, potensi yang ada dan harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan.

B. Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan Sebagai berikut :

1. Menentukan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus dalam optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah.
2. Menentukan arah kegiatan untuk meletakkan dasar sistem pemerintahan daerah yang memperhatikan kerangka regulasi dan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam program kerja.
3. Memberikan tolok ukur dan evaluasi kinerja tahunan dan lima tahunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus;
4. Memudahkan bagi aparatur di Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus dalam mencapai tujuan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terarah, terpadu, terukur, dan berkelanjutan;
5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Kudus.

7 JK

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus.

BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV. Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII. Penutup

8/16

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran umum pelayanan memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan melalui Renstra SKPD ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

A. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pembinaan administrasi aparatur sipil negara perangkat daerah dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan serta pelayanan administrasi.

B. Fungsi

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di lingkungan Sekretariat Daerah;
- b. pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- d. pembinaan Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah;
- e. pelayanan dan pembinaan administratif pengelolaan keuangan daerah dan aset, Aparatur Sipil Negara di daerah dan ketatalaksanaan;
- f. pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah yang meliputi pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan serta administrasi umum; dan
- g. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8 9 6

C. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus, Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
 - a. Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan; dan
 - b. Subbagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Bina Mental Spiritual; dan
 - b. Subbagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat.
 3. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perundang-Undangan;
 - b. Subbagian Subbagian Bantuan Hukum; dan
 - c. Subbagian Subbagian Dokumentasi dan Informasi.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 1. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perekonomian dan Sumber Daya alam; dan
 - b. Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a. Subbagian Penyusunan Program; dan
 - b. Subbagian Pengendalian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
 - a. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c. Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
 1. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 2. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - a. Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b. Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - c. Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari
 - a. Subbagian Protokol; dan
 - b. Subbagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat Daerah didukung oleh 143 personil, yang dirinci sebagai berikut :

Tabel 2

Sumber Daya Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus

No.	Uraian	Jumlah
1.	Menurut Jabatannya : <ul style="list-style-type: none">- Jabatan Pimpinan Tinggi- Administrator- Pengawas- Pelaksana- Jabatan Fungsional Tertentu	7 orang 9 orang 22 orang 102 orang 3 orang
2.	Menurut Tingkat Pendidikan : <ul style="list-style-type: none">- S2- S1 / D-IV- D-III- D-II- SMA- SMP- SD	20 orang 67 orang 9 orang 1 orang 40 orang 2 orang 4 orang
3.	Menurut Golongan : <ul style="list-style-type: none">- Golongan IV- Golongan III- Golongan II- Golongan I	16 orang 95 orang 30 orang 2 orang

Dari tabel diatas menurut jabatannya, untuk pelaksana sebanyak 102 orang atau 71,3%, pengawas sebanyak 22 orang atau 15,4%, Administrator sebanyak 9 orang atau 6,3% dan Jabatan Pimpinan Tinggi sebanyak 7 orang atau 4,9%.

Menurut Tingkat Pendidikan mayoritas pegawai di Sekretariat Daerah berpendidikan S1/D-IV yaitu sebanyak 67 orang atau 46,9%, disusul SMA sebanyak 40 orang atau 28,9%, berpendidikan S2 sebanyak 20 orang atau 14%, D-3 sebanyak 9 orang atau 6,3%, SD sebanyak 4 orang atau 2,8%, berpendidikan SMP sebanyak 2 orang atau 1,4% dan berpendidikan D-II sebanyak 1 orang atau 0,7%.

Berdasarkan golongan mayoritas pegawai di Sekretariat Daerah bergolongan ruang III sebanyak 95 orang atau 66,4%, disusul golongan ruang II sebanyak 30 orang atau 21%, golongan ruang IV sebanyak 16 orang atau 11,2% dan golongan ruang I sebanyak 2 orang atau 1,4%.

✓ 86

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018, Sekretariat Daerah telah melaksanakan berbagai macam program dan kegiatan yang direncanakan dalam kurun waktu lima (5) tahun. Adapun capaian-capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja dapat dilihat pada matrik berikut :

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah fasilitasi penerimaan kunjungan kerja				25 kl	25 kali	25 kali	25 kali	25 kali	10 kl	25 kali	25 kali	40 kali	50 kali	40%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Rapat Koordinasi Pimpinan				6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	3 kali	6 kali	6 kali	5 kali	5 kali	3 kali	100%	100%	83%	83%	100%
3	Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kudus				1 kali	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
4	Evaluasi kinerja Camat				9 kec	-	-	9 kec	9 kec	9 kec	-	-	9 kec	9 kec	100%	-	-	100%	100%
5	Presentase fasilitasi kerjasama antar daerah				1 kl	-	1 kl	1 kl	1 kali	1 kl	-	1 kl	1 kl	1 kali	100%	-	100%	100%	100%

7/12

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-									
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)															
6	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan				3 kali	3 kali	3 kali	2 kl	1 kali	3 kali	3 kali	3 kali	2 kl	1 kali	100%	100%	100%	100%	100%															
7	Jumlah buku laporan pelaksanaan kerjasama				30 buku	30 buku	30 buku	10 buku	20 buku	30 buku	30 buku	30 buku	10 buku 6 ks ad 1 ks pihak ke 3	20 buku	100%	100%	100%	100%	100%															
8	Jumlah LPPD, EKPPD, Buku Memori Bupati				50 LPPD ATA 50 LPPD * AMJ	50 LPPD ATA	50 LPPD ATA	50 LPPD ATA	10 LPPD ATA	50 LPPD ATA 50 LPPD AMJ	50 LPPD ATA	50 LPPD ATA	50 LPPD ATA	10 LPPD ATA	100%	100%	100%	100%	100%															
9	Buku laporan Pilkada				25 buku	20 buku	-	-	20 buku	25 buku	20 buku	-	-	20 buku	100%	100%	-	-	100%															
10	Jumlah publikasi yang diterbitkan melalui media massa				1 kl	1 kl	1 kl	1 kl	1 kl	1 kl	1 kl	1 kl	1 kl	1 kl	100%	100%	100%	100%	100%															

796

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
11	Jumlah dokumen kinerja daerah				-	-	1 dok	1 dok	1 dok	-	-	1 dok	1 dok	1 dok	-	-	100%	100%	100%
12	Jumlah Produk Hukum yang disusun				136 draft	136 draft	136 draft	136 draft	136 draft	351 draft	321 draft	286 draft	314 draft	227 draft	258 %	200 %	210 %	230 %	167 %
13	Presentase penanganan kasus pengaduan di lingkungan Penda				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	70 %
14	Jumlah produk hukum yang didistribusikan				520 bk	520 bk	520 bk	1.540 bk	1.540 bk	520 bk	433 bk	730 bk	1.320 bk	1.155 bk	100 %	83 %	86 %	47 %	75 %
15	Jumlah sosialisasi ketentuan cukai				6 kl	-	9 kl	-	-	-	-	9 kl	-	-	-	-	100 %	-	-
16	Peningkatan kinerja aparatur				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18	Persentase peningkatan obyek sasaran yang ditangani				80%	80%	80%	80%	80%	56,87%	28%	18%	88%	94%	71,09%	35%	22,50	110	117,5
19	Persentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD				2%	2%	2%	2%	2%	15,34%	21,35%	29,71%	20,35%	15,09%	767%	1075%	1485%	1017%	754,5%

4
96

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5															
20	Jumlah Rakor Ekuinda				2 kl	2 kl	2 kl	2 kl	2 kl	2 kl	2 kl	2 kl	2 kl	2 kl	100	100	100	100	100															
21	Cakupan penerima Raskin				36.332	36.332	36.332	36.332	36.332	36.332	36.332	36.332	35.166	0	100	100	100	100	0															
22	Persentase pengendalian money dan pelaporan kegiatan SKPD				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%															
23	Persentase informasi jasa konstruksi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%															
24	Fasilitasi proses pengadaan barang/jasa				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%															
25	Lama proses perijinan usaha jasa konstruksi				15hr	15hr	15hr	15hr	15hr	10 hr	10 hr	10 hr	10 hr	10 hr	150%	150%	150%	150%	150%															
26	Jumlah kegiatan upacara hari besar nasional dan fasilitasi resepsi kenegaraan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100															
27	Jumlah peserta dialog antar umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100															

7/12

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
28	Tingkat intensitas dan peran dalam melaksanakan ibadah agama				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
29	Pelaksanaan hisab dan rukyat, penentuan arah kiblat dan pembuatan jadwal imsakiah dan sholat fardlu.				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
30	Jumlah pengajian selapanan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
31	Jumlah Penyaluran hibah dan bansos keagamaan	-	-		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
32	Jumlah peserta diklat				-	10 org	-	20 orang	-	-	10 org	-	20 orang	-	-	100	-	100	-
33	Jumlah peserta bimtek				-	60 org	-	60 orang	-	-	60 org	-	60 orang	-	-	100	-	100	-
34	Tersusunnya dokumen LAKIP, Dokumen PK				3 dok	2 dok	2 dok	2 dok	3 dok	3 dok	2 dok	2 dok	2 dok	3 dok	100	100	100	100	100

402

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)										
35	Jumlah rapat koordinasi pimpinan				-	11 kali	11 kali	11 kali	11 kali	-	11 kali	11 kali	11 kali	11 kali	-	100	100	100	100										
36	Tersusunnya dokumen standar satuan harga				1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	100	100	100											
37	Jumlah dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi				1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	100	100	100											
38	Jumlah SKPD yang sudah terevaluasi kelebagaannya				4 SKPD	5 SKPD	5 SKPD	5 SKPD	-	4 SKPD	5 SKPD	5 SKPD	5 SKPD	100	100	100	100	100											
39	Tersedianya pedoman IKM				44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	-	44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	-	100	100	100	100											
40	Jumlah unit pelayanan yang sudah di SKM				14 unit	20 unit	20 unit	20 unit	-	14 unit	20 unit	20 unit	20 unit	-	100	100	100	100											
41	Jumlah SKPD yang sudah di SKM / Teknis				28 SKPD	-	6 SKPD	7 SKPD	-	28 SKPD	-	6 SKPD	7 SKPD	-	100	-	100	100											

412

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	1	2	3	4	5	(10)	1	2	3	4	5	(15)	1	2	3	4	5								
42	Jumlah SKPD yang sudah di anjab				-	6 SKPD	7 SKPD	7 SKPD	8 SKPD	-	6 SKPD	7 SKPD	7 SKPD	8 SKPD	-			100	100	100	100								
43	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi kantor	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100								
44	Terpenuhinya kebutuhan sarpras kantor	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100								
45	Terpenuhinya kelengkapan pakaian dinas aparaturnya	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100								
46	Terpenuhinya Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	°	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100								

Berdasarkan tabel diatas pada umumnya dapat tercapai sesuai dengan target, namun ada indikator yang capaiannya melebihi target maupun tidak mencapai target yaitu fasilitas penerimaan kunjungan kerja dari dari pemerintah daerah / pusat. Ini disebabkan antara lain jumlah kunjungan tamu yang sulit diprediksi.

✓

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus

A. Analisis Lingkungan Internal

1. Analisis Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Sekretariat Daerah adalah :

- a. Jumlah sumber daya manusia yang memadai.
- b. Dedikasi, integritas, disiplin, semangat dan kemauan belajar para pegawai cukup memadai
- c. Motivasi, dorongan dan bimbingan Pimpinan satuan Kerja kepada staf / bawahan cukup baik.
- d. Dukungan dan apresiasi pimpinan terhadap kinerja
- e. Jumlah SDM yang menempati posisi yang dibutuhkan
- f. Tersedianya produk-produk perencanaan
- g. Loyalitas pegawai
- h. Komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan
- i. Adanya tingkat pendidikan staf yang cukup memadai
- j. Terciptanya Jiwa Korsa

2. Analisis Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Sekretariat Daerah antara lain :

- a. Masih kurangnya SDM aparatur yang sesuai kompetensi di bidangnya.
- b. Sering terjadinya pengalihan penugasan yang relatif singkat sehingga mengganggu keaktifan kinerja.
- c. Terbatasnya data dan informasi pembangunan yang akurat.
- d. Dokumen perencanaan belum tertata dengan baik.

B. Analisis Lingkungan Eksternal

1. Analisis Peluang (*Opportunities*)

Berdasarkan analisa eksternal yang dilakukan, maka peluang-peluang yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan paradigma masyarakat dari gaya tradisional ke gaya modern dengan pemanfaatan berbagai media informasi, komunikasi. Kondisi yang menunjukkan masyarakat berubah menuju masyarakat informasi. Hal ini ditandai kebutuhan akan informasi yang tinggi dengan menggunakan berbagai media komunikasi dan informasi yang ada.
- b. Perkembangan teknologi yang mendukung kecepatan arus informasi dan komunikasi.
- c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- d. Kondisi stabilitas keamanan, ketertiban dan politik yang kondusif di Kabupaten Kudus, sehingga memperbesar kemungkinan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten lain, swasta, LSM, dan lembaga-lembaga lainnya.

- e. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan yang lebih partisipatif.
 - f. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas SDM.
 - g. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang dalam penyusunan produk-produk perencanaan.
 - h. Regulasi perundang-undangan.
 - i. Pertumbuhan Ekonomi Makro.
 - j. Perkembangan Pembangunan Daerah.
 - k. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 - l. Kebutuhan perkembangan organisasi.
 - m. Peraturan Perundang-undangan bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan kinerja aparatur.
2. Analisa Ancaman (*Threat*)
- Munculnya peluang di berbagai sektor akan menjadi suatu tantangan bagi Sekretariat Daerah. Tantangan yang harus dijawab adalah sebagai berikut :
- a. Peraturan/kebijakan pemerintah pusat yang sering berubah-ubah.
 - b. Beragamnya tingkat dan latar belakang pendidikan yang tentunya mempengaruhi pola pikir dan pola tindak.
 - c. Demokratisasi dan keterbukaan yang tidak sesuai dengan koridor hukum yang dilakukan oleh sebagian masyarakat.
 - d. Faktor globalisasi dan kebijakan yang senantiasa berubah dengan cepat cenderung mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung kondisi perekonomian daerah.
 - e. Belum tersedianya petunjuk operasional yang mendukung dari suatu peraturan sehingga menimbulkan multi tafsir.
 - f. Kebijakan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat seperti BBM, TDL, dan LPG yang berpengaruh signifikan terhadap inflasi.
 - g. Kondisi ekonomi yang kurang stabil.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas dalam prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Isu strategis bagi PD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi PD di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu - isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi meliputi :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 digunakan metode *Analisis, Strength, Weakness, Opportunities, and Threat* (SWOT), yang akan Menghasilkan Analisis dan Pilihan Strategis (*Strategic Analysis and Choices*) yang merupakan asumsi-asumsi hasil analisa dan kemudian dapat digunakan untuk menentukan Faktor Penentu Keberhasilan dan Faktor Ancaman Kegagalan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan PD, dapat kita identifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Ego sektoral masing-masing Perangkat Daerah masih tinggi di Sekretariat Daerah.
- b. Regulasi / peraturan perundang-undangan.
- c. Jabatan fungsional pengadaan barang jasa belum tersedia.
- d. Pelayanan dan fasilitasi administrasi pembangunan belum optimal.
- e. Belum optimalnya tata kelola kelembagaan.
- f. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik.
- g. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- h. Kurangnya kesejahteraan guru non PNS di Madin/RA/TPQ/Madrasah.
- i. Kurangnya apresiasi terhadap khotib dan imam masjid / mushola, serta semua pemuka agama/semua tempat ibadah.
- j. Kurangnya kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan rendah.
- k. Pelayanan dan fasilitasi penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan belum optimal.

102

- l. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasana di lingkup gedung perkantoran Bupati belum optimal.
- m. Regulasi pusat yang tidak sesuai dengan keadaan di daerah.
- n. Kunjungan tamu kepala daerah / wakil kepala daerah tidak terprediksi.

406

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah			Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pencapaian nilai indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah	Turunnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Kurangnya perhatian perangkat daerah terhadap pencapaian target urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya
	Belum terciptanya tertib administrasi pemerintahan yang memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis	Belum adanya kepastian batas wilayah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kudus			Keterbatasan ketersediaan anggaran pemerintah daerah
	Belum optimalnya pelaksanaan kerja sama daerah	Kurangnya komitmen perangkat daerah dalam menjalankan perjanjian kerja sama yang sudah ada			Kurangnya dukungan anggaran dalam melaksanakan perjanjian kerja sama daerah yang sudah terjalin
2.	Regulasi / peraturan perundang-undangan	Tidak adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan diatasnya dengan aturan pelaksanaanya			Regulasi yang sering berubah - ubah
3.	Kurangnya kesejahteraan guru non PNS di Madin/RA/TPQ/Madrasah	Kurangnya kualitas pendidikan yang diberikan			Kurangnya insentif guru non PNS
	Kurangnya apresiasi terhadap khotib dan imam masjid / mushola, serta semua pemuka agama/semua tempat ibadah	Rendahnya daya beli khotib dan imam masjid / mushola, serta semua pemuka agama/semua tempat ibadah			Kurangnya penghasilan khotib dan imam masjid / mushola, serta semua pemuka agama/semua tempat ibadah
	Kurangnya kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan rendah	Rendahnya pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah			Belum terfasilitasinya pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah
4.	Kinerja Perusahaan Daerah blm optimal	Masih adanya perusahaan daerah yang mengalami penurunan laba			Persaingan usaha yang cukup tinggi dan tingginya biaya operasional
5.	Belum optimalnya Pelayanan dan fasilitas administrasi pembangunan	Rendahnya tingkat akurasi pemantauan perkembangan kegiatan fisik/ non fisik			Belum adanya sistem pelaporan kegiatan yang menyeluruh

1/2

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
6.	SOP Pengadaan barang jasa belum lengkap	Penyusunan SOP masih dalam proses melengkapi	Perubahan aturan pengadaan barang jasa
	SDM pengadaan barang jasa masih terbatas	Belum adanya jabatan fungsional pengadaan barang / jasa	Masih terbatas SDM yang memenuhi kualifikasi jabatan fungsional pengadaan barang jasa
	Sistem belum terintegrasi	Integrasi sistem masih dalam proses	Belum ada integrasi antara sistem perencanaan, pengadaan dan keuangan
7.	Belum optimalnya pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dalam mendorong pelayanan yang efektif dan efisien, serta masih rendahnya motivasi dari unit pelayanan publik dalam menciptakan inovasi-inovasi yang dapat menciptakan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Banyaknya penyelenggara pelayanan publik belum sepenuhnya menjalankan standar pelayanan dengan konsisten
	Masih rendahnya nilai akuntabilitas kinerja	Belum optimalnya evaluasi SAKIP sebagai upaya perbaikan penilaian akuntabilitas kinerja	Belum terintegrasinya sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem kinerja
	Efektifitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas dan fungsi belum sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan oleh aparaturnya secara maksimal yang berakibat terhadap kinerja organisasi	Regulasi terkait Evaluasi Kelembagaan perangkat Daerah yang selama ini ada belum dapat dijadikan pedoman untuk menentukan ukuran efektifitas dan efisiensi Kelembagaan Perangkat Daerah secara tepat
8.	Belum optimalnya pelayanan keprotokol dan dokumentasi pimpinan	Jumlah kegiatan pimpinan daerah tidak sebanding dengan SDM yang tersedia	Kurangnya SDL protocol dan dokumentasi pimpinan serta perlu adanya penambahan kompetensi bagi SDM yang ada.
9.	Pelayanan dan fasilitasi penatausahaan, pelaporan administrasi keuangan dan tata usaha pimpinan belum optimal	Perubahan regulasi & aplikasi dalam penatausahaan, pelaporan keuangan dan tata usaha pimpinan	Belum optimalnya teknologi dan kurangnya sosialisasi
	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasana Rumah Dinas dan gedung perkantoran belum optimal	Kurangnya perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan	Penganggaran berdasarkan skala prioritas
	Kunjungan tamu kepala daerah / wakil	Penerimaan kunjungan tamu kepala daerah / wakil	Sulit memprediksi jumlah dan anggaran terkait

102

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	kepala daerah tidak terprediksi	kepala daerah kurang optimal	kunjungan tamu kepala daerah / wakil kepala daerah

Y
Q₂

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi

Visi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dirumuskan dengan memperhatikan gambaran umum kondisi daerah, gambaran umum pengelolaan keuangan daerah dan analisis isu strategis. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka visi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 adalah : **“KUDUS BANGKIT MENUJU KABUPATEN MODERN, RELIGIUS, CERDAS DAN SEJAHTERA”**. Visi tersebut mengandung kata kunci yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Bangkit. Bangkit merupakan suatu tindakan semangat dari masyarakat untuk bangun menggugah dan memajukan daerah. Tindakan semangat yang ditimbulkan dapat memperkuat dan mengembangkan potensi daerah untuk bersaing dengan daerah lain. Daerah yang bangkit mampu memperbaiki permasalahan daerah dan menyejahterakan masyarakat.

Modern. Modern merupakan suatu sikap, cara berpikir, dan cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Kabupaten modern adalah kabupaten yang memiliki daya saing dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki serta dapat menyelaraskan antara sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan teknologi yang dikembangkan. Penggunaan teknologi sebagai pendukung perkembangan suatu daerah dapat menjadikannya selalu *up to date* dalam segala informasi. Penggunaan teknologi untuk menjadikan kabupaten modern akan memudahkan pelayanan pada masyarakat. Kabupaten modern dapat menciptakan kabupaten yang nyaman, terdepan dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Religius. Religius merupakan sikap dan perilaku masyarakat yang taat/patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama. Karakter religius sangat penting dalam kehidupan masyarakat, menjadi sikap hidup yang mengacu pada tatanan dan larangan dan tatanan sikap yang telah diatur dalam aturan agamanya. Sikap religius pada setiap individu akan menciptakan rasa aman, tentram dan damai dalam kehidupan masyarakat.

Cerdas. Cerdas berarti mempunyai kebiasaan atau tradisi, sikap dan kemampuan untuk selalu belajar guna meningkatkan pengetahuan, intelektual, emosional dan spiritual.

Sejahtera. Sejahtera berarti aman sentosa dan makmur dengan suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik materiil maupun spiritual. Keadaan Sejahtera memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia.

146

Visi Kabupaten Kudus yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 adalah "Kudus yang Religius, Maju dan Adil". Apabila visi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 disandingkan dengan visi Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025, maka dapat dilihat bahwa kedua visi tersebut mengarah ke satu tujuan yang sama. Jika visi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 disandingkan dengan visi Provinsi Jawa Tengah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025 yaitu "Jawa Tengah yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Lestari", maka terlihat juga bahwa kedua visi tersebut menuju pada satu titik tujuan yang sama. Dari kedua visi tersebut diatas, apabila disandingkan dengan visi RPJM Nasional Tahun 2010-2014 atau Visi Indonesia 2014 yaitu "Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan" dan visi RPJP Nasional Tahun 2005 - 2025 yaitu "Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur", maka terlihat jelas bahwa kedua visi tersebut telah selaras dengan visi Pemerintah Republik Indonesia dalam RPJM Nasional Tahun 2010-2014 dan RPJP Nasional Tahun 2005-2025. Dengan demikian visi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 memiliki keterkaitan dan hubungan yang erat serta selaras dengan visi RPJPD Kabupaten Kudus, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJM Nasional Tahun 2010 -2014 serta RPJP Nasional Tahun 2005-2025.

b. Misi

Misi yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 adalah :

1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.
3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.

Misi Bupati terpilih memperlihatkan pilar penting yang perlu diprioritaskan dalam proses pembangunan di Kabupaten Kudus, yang dikenal dengan 9 (Sembilan) Program Unggulan yaitu :

1. Tunjangan 1 juta per bulan untuk semua guru non PNS di PAUD/ TK/ MADIN/ RA/ TPQ/SD/SMP/SMA/MADRASAH.
2. Bantuan sosial santunan bagi warga yang sakit di rumah sakit kelas 3 dan santunan anak yatim piatu serta santunan kematian cair dalam satu hari lewat desa.
3. Pelatihan dan pendampingan 500 wirausahawan baru setiap tahun.
4. Bantuan sosial per bulan untuk khotib dan imam masjid/ mushola serta semua pemuka agama /semua tempat ibadah.

✓ 42

5. Pendampingan dan pemberdayaan petani melalui inovasi bibit serta penguatan pemasaran hasil panen.
6. Pemberdayaan ekonomi dan usaha warga melalui penyaluran bantuan usaha.
7. Pembinaan olahraga, seni budaya dan komunitas kreatif untuk peningkatan sumberdaya manusia.
8. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan, kepala keluarga melalui pelatihan khusus kewirausahaan.
9. Pemberdayaan buruh melalui forum komunikasi PUK/ SP/ SB, perusahaan dan pemerintahan daerah.

Untuk mencapai visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sangat diperlukan keberhasilan dalam pelayanan PD. Hasil identifikasi Sekretariat Daerah tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini akan menjadi masukan bagi perumusan strategis pelayanan Sekretariat Daerah. Dengan demikian isu-isu yang dirumuskan tidak hanya berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong agar dapat memberikan kontribusi untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat Daerah terhadap pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

Y Q L

Tabel 3.2.
Telaah Visi, Misi, dan Program KDH

No	Visi/ Misi/ Program Kerja KDH	Tupoksi OPD	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Visi : Kudus bangkit menuju kabupaten modern, religius, cerdas dan sejahtera	Membantu Bupati dalam pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pembinaan administratif aparatur sipil negara perangkat daerah dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta pelayanan administrasi			
	Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif,, inovatif, dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia	Fungsi : <ul style="list-style-type: none"> - Perumusan kebijakan daerah di lingkungan setda - Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah - Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah - Pembinaan aparatur sipil negara perangkat daerah - Pelayanan dan pembinaan administratif pengelolaan keuangan daerah dan aset, ASN di daerah dan ketatalaksanaan - Pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah - Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasaan lain yg diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 			

8/4/20

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi OPD	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Program Kerja KDH : Program Peningkatan Kualitas Pendidikan		Kurangnya kesejahteraan guru non PNS di Madin/RA/TPQ/Madrasah	Tunjangan guru non PNS masih rendah	Kebijakan Bupati
	Program Peningkatan Kesejahteraan rakyat		Kurangnya apresiasi terhadap khotib dan imam masjid / mushola, serta semua pemuka agama/semua tempat ibadah	Tunjangan khotib dan imam masjid / mushola, serta semua pemuka agama/semua tempat ibadah masih rendah	Kebijakan Bupati
2.	Misi 2 : Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik	tugas : sda fungsi : sda			
	Program kerja KDH : - Program peningkatan transparansi anggaran dan akuntabilitas		Belum terdapat pendelegasian kewenangan kepala daerah kepada Camat sesuai regulasi yang ada	Peraturan perundangan-undangan yng sering berubah-ubah	Kebijakan pimpinan untuk membuat pendelegasian kewenangan kepala daerah kepada Camat
			Regulasi / peraturan perundang-undangan	Peraturan diatasnya yng sering berubah-ubah	Kebijakan pimpinan utk membuat aturan
			SOP Pengadaan barang jasa belum lengkap	Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai	Regulasi pengadaan barang jasa yang sudah tersedia
			Organisasi pengadaan barang jasa belum sesuai dengan regulasi	Perlu waktu untuk melakukan review organisasi	Fungsi organisasi organisasi sudah diatur di Perpres 16

10/10

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi OPD	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			Belum optimalnya evaluasi SAKIP	Belum terintegrasinya sistem perencanaan, anggaran dan kinerja	Pemanfaatan Sistem Informasi Tahun 2018
			Belum Optimalnya pelayanan keprotokolan dan dokumentasi pimpinan	Terbatasnya SDM ASN yang menguasai teknis keprotokolan dan dokumentasi pimpinan di Perangkat Daerah lain	Terbukanya kesempatan untuk mengikuti Diklat Keprotokolan untuk SDM yang ada
	Program Pengelolaan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan, serta pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga bagian.	Masih adanya perusda yang mengalami penurunan laba	Persaingan usaha yang cukup tinggi dan tingginya biaya operasional	Adanya dukungan Pemda untuk Pembinaan dan Penyerahan Modal
			Tingginya DBHCHT yang tidak tersempit, sehingga outputnya tidak maksimal	Regulasi pemanfaatan DBHCHT yg cenderung kaku	Adanya kebijakan pemerintah yg mendukung
			Rendahnya tingkat akurasi pemantauan perkembangan kegiatan fisik/ non fisik	Belum adanya sistem aplikasi pelaporan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan manual semakin tinggi

✓ Qc

No	Visi/ Misi/ Program Kerja KDH	Tupoksi OPD	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			SDM pengadaan barang jasa masih terbatas	SDM yang memenuhi kualifikasi masih tersebar di OPD	Terbukanya kesempatan untuk jabatan fungsional pengadaan barang jasa
			Belum optimalnya tata kelola kelembagaan, tata laksana, pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> Regulasi kebijakan terkait kelembagaan berubah-ubah kurang jelas Pelaksanaan Standar Pelayanan belum sepenuhnya konsisten 	Pemanfaatan sistem informasi
			Pelayanan dan fasilitas penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan belum optimal	Perubahan regulasi dan kurangnya sosialisasi	Penggunaan sistem aplikasi
			Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasana di lingkup gedung perkantoran Bupati belum optimal	Penganggaran berdasarkan skala prioritas	Penggunaan sistem informasi
3.	Visi : sda	Tugas : sda			
	Misi 3 : Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.	Fungsi : sda			
	Program Kerja KDH : Pemanfaatan CSR, Infaq dan Shodaqoh		Kurangnya kesejahteraan masyarakat yang berpengaruh rendah	Data masyarakat miskin masih belum akurat	Anggaran memadai dan tingkat CSR di Kudus cukup tinggi

Y
A
K

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten / Kota

No.	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1.	<p><i>Renstra Kementrian PAN dan RB :</i></p> <p>Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada presiden dan wakil presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan</p>	<p>Membantu Bupati dalam pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pembinaan administratif aparatur sipil negara perangkat daerah dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesra, ekonomi dan pembangunan serta pelayanan administrasi umum</p>	<p>Perumusan kebijakan sebagian belum berdasarkan suatu telaah atas data/informasi yang kuat dan menyeluruh karena egosektoral masing-masing Perangkat Daerah masih tinggi</p>	<p>Faktor penghambat : Etos kerja ASN masih belum maksimal</p> <p>Faktor Pendorong : Sistem reward and punishment berjalan baik</p>
2.	<p><i>Renstra Setda Provinsi Jawa Tengah :</i></p> <p>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah</p>	<p>Pelayanan dan pembinaan administratif pengelolaan keuangan daerah dan aset, ASN di daerah dan ketatalaksanaan</p>	<p>Belum optimalnya tata kelola kelembagaan, tata laksana, pelayanan publik</p> <p>Pelayanan dan fasilitasi penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan belum optimal</p>	<p>Faktor penghambat : Regulasi kebijakan terkait kelembagaan berubah-ubah dan kurang jelas.</p> <p>Faktor Pendorong : Penggunaan sistem informasi</p> <p>Faktor penghambat : Perubahan regulasi dan kurangnya sosialisasi</p> <p>Faktor Pendorong : Penggunaan sistem aplikasi</p>

14

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Pelayanan PD Sekretariat Daerah adalah di bidang penyelenggaraan administrasi pemerintahan tidak terdapat implikasi negatif terhadap Tata Ruang.

Tidak ada program di Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus yang terkait langsung dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, namun demikian apabila ada program / kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup maka pelaksanaannya akan berpedoman pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kudus.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu – isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Merujuk pada identifikasi permasalahan Sekretariat Daerah, visi misi dan arah kebijakan kepala daerah terpilih, hasil analisa Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Telaah RTRW Kabupaten Kudus, serta dengan memperhatikan isu-isu penting lainnya, maka beberapa hal yang harus dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus yakni sebagai berikut :

- a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik ;
- b. Peningkatan daya saing daerah;
- c. Peningkatan penataan terhadap peraturan perundang – undangan;
- d. Peningkatan sarana dan prasarana kantor;
- e. Peningkatan kerukunan hidup umat beragama;
- f. Peningkatan Kinerja Perusahaan daerah
- g. Peningkatan SDM aparatur daerah;
- h. Peningkatan tertib administrasi dan pelaporan keuangan serta peningkatan sarana prasana;
- i. Meningkatnya pelayanan kedinasan KDH dan Wakil KDH.

Y L

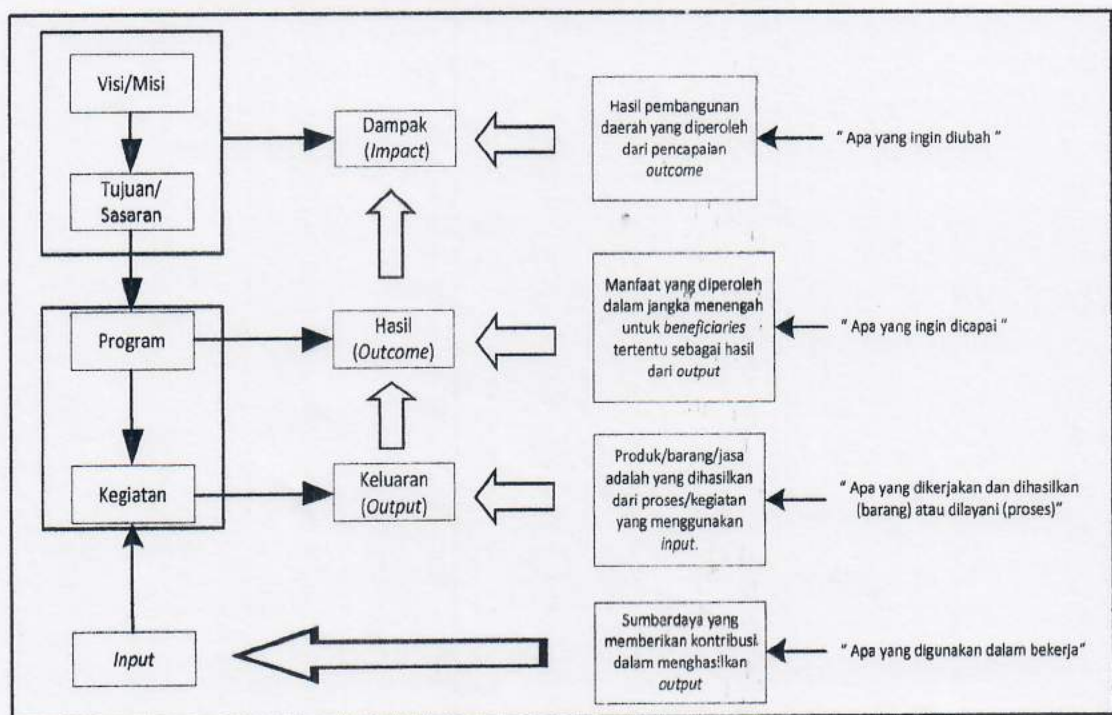
BAB IV

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama 5 tahun. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.1.

Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah



Dari gambar di atas, jelas bahwa tujuan dan sasaran mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan di Sekretariat Daerah secara keseluruhan. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan PD menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan PD lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil maupun keluaran dari suatu kegiatan, program dan sasaran.

a. Tujuan

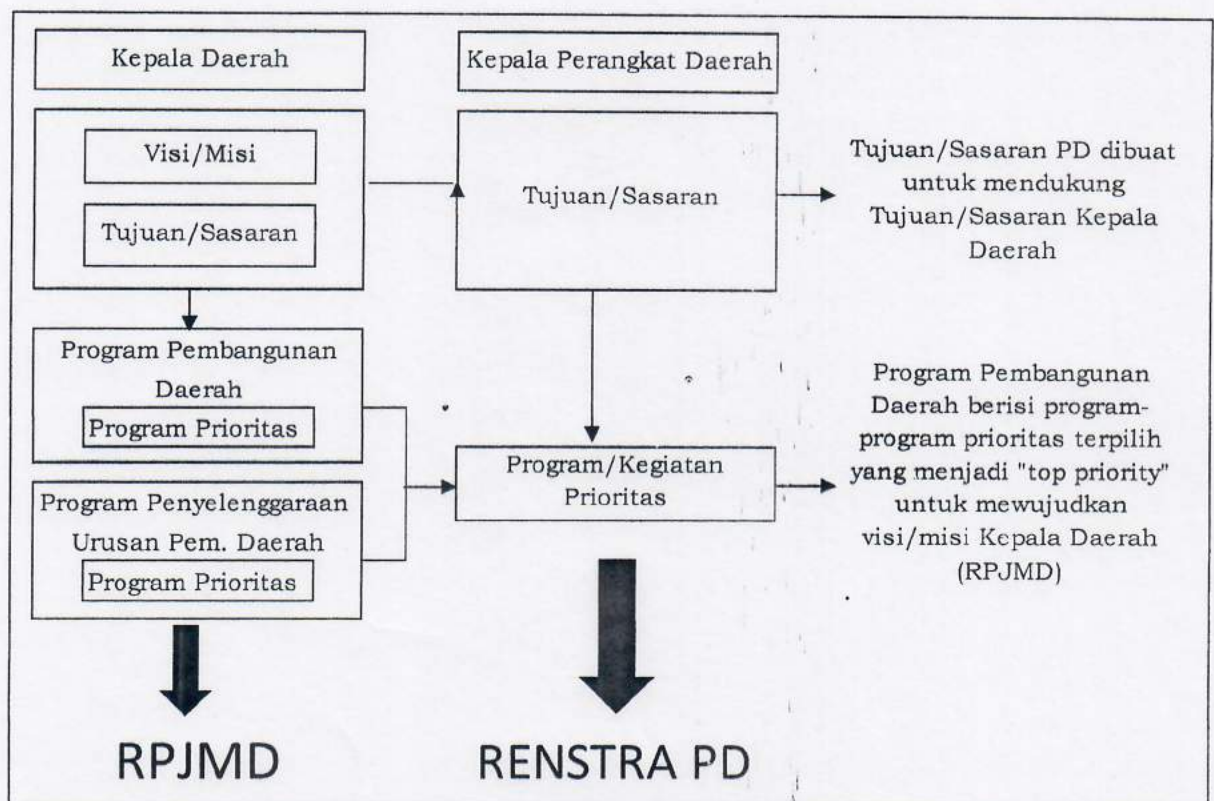
Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi Setda. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi PD dan memiliki keterkaitan dengan visi PD yang ingin dicapai. Pernyataan

746

tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.2.
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



Tujuan yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus dalam kurun waktu 1-5 tahun (Tahun 2018-2023) adalah

"Meningkatkan Efektivitas serta Akuntabilitas Pemerintahan Daerah"

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya sinergitas pelaksanaan kebijakan daerah dan kesejahteraan rakyat;
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan bidang perekonomian dan pembangunan;
3. Meningkatnya pelaksanaan kebijakan dibidang organisasi, keprotokolan dan komunikasi pimpinan serta administrasi umum.

Y/K

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal		TARGET CAPAIAN							Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1.	Meningkatkan Efektivitas serta Akuntabilitas Pemerintahan Daerah		Nilai SAKIP		68,19	70,5	72,5	75	81	83	83		
			Nilai LPPD	ST (3,49)	ST (3,19)	ST (3,20)	ST (3,21)	ST (3,22)	ST (3,23)	ST (3,24)	ST (3,24)		
			Angka Inflasi Daerah	4,17	3,11	3.5 +/- 1%	3.5 +/- 1%	3.5 +/- 1%	3.5 +/- 1%	3.5 +/- 1%	3.5 +/- 1%		
			Indeks reformasi birokrasi		67,05	69,17	74	79	85	90	90		
		1. Meningkatkan sinergitas pelaksanaan kebijakan daerah dan kesejahteraan rakyat	Persentase capaian kinerja bidang pemerintahan	-	-	80%	80,5%	81%	81,5 %	82%	82%		
		2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase capaian kinerja bidang perekonomian dan pembangunan	-	-	80%	80,5%	81%	81,5 %	82%	82%		
		3. Meningkatkan pelaksanaan kebijakan dibidang organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan serta administrasi umum	Persentase capaian kinerja bidang organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan serta administrasi umum	-	-	83%	83,5%	84%	84,5%	85%	85%		

192

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran dalam 5 (lima) tahun. Dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilakukan selama 5 tahun kedepan. Strategi dan arah kebijakan akan diuraikan sebagai berikut :

17/4/16

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 Meningkatkan Efektivitas serta Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	1. Sasaran 1 Meningkatnya sinergitas pelaksanaan kebijakan daerah	1. Strategi 1.1 Penataan perundang-undangan 2. Strategi 1.2 Peningkatan penyusunan dan pendistribusian produk hukum 3. Strategi 1.3 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan penda 4. Strategi 1.4 Peningkatan fasilitasi tata pemerintahan dan kerjasama antar pemerintah daerah 5. Strategi 1.5 Peningkatan kescjahteraan sosial kegiatan dan keagamaan 6. Strategi 1.6 Peningkatan fasilitasi pemanfaatan zakat, infak dan sodagoh	Tahun 2019 : Penguatan Efektivitas serta Akuntabilitas Pemerintahan Daerah Tahun 2020 : Pemanetapan Efektivitas serta Akuntabilitas Pemerintahan Daerah Tahun 2021 : Percepatan Efektivitas serta Akuntabilitas Pemerintahan Daerah Tahun 2022 : Peningkatan Efektivitas serta Akuntabilitas Pemerintahan Daerah Tahun 2023 : Peningkatan Efektivitas serta Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
	2. Sasaran 1.2 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan bidang perekonomian dan pembangunan	1. Strategi 2.1 Peningkatan komunikasi dan kerjasama lintas OPD, Pemerintah, Stakeholder lainnya untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah 2. Strategi 2.2 Peningkatan pelayanan dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa	

102

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3. Strategi 2.3 Peningkatan fasilitasi penyusunan program dan pelaporan	
	3. Sasaran 1.3 Meningkatkan pelaksanaan kebijakan dibidang organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan serta administrasi umum	1. Strategi 3.1 Penataan dan penguatan kelembagaan Strategi 3.2 Penataan ketatalaksanaan dan Peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Strategi 3.3 Penguatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Strategi 3.4 Peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan Wakil KDH 5. Strategi 3.5 Peningkatan kelancaran pelayanan kedinasan Setda 6. Strategi 3.6 Peningkatan kelancaran pelayanan kedinasan Setda 7. Strategi 3.7 Pengelolaan komunikasi dan informasi Pimpinan Daerah	

4/8/20

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Agar strategi yang ditetapkan berjalan baik, maka perlu disusun suatu kebijakan operasional sebagai pedoman atau acuan dalam menjabarkan strategi ke dalam program dan kegiatan. Kebijakan operasional merupakan acuan, pedoman yang memberikan arah program, kegiatan yang akan dilakukan dan sumber daya yang diberdayakan dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 memuat visi yang merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan dalam suatu misi yang dijabarkan dalam rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut.

Selanjutnya misi dijabarkan dalam tujuan mengenai apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, kemudian tujuan dijabarkan dalam bentuk sasaran yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu instansi dalam kurun waktu tertentu.

Strategi merupakan langkah dan cara yang harus ditempuh agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diuraikan kedalam kebijakan, program dan kegiatan. Untuk mencapai sasaran tersebut lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran Tabel Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023.

Rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah yang tertuang dalam Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 ini merupakan serangkaian langkah penjabaran dari kebijakan dan strategi yang akan dilakukan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang selanjutnya untuk mewujudkan misi dan visi Sekretariat Daerah. Rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah ini juga merupakan bagian dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kudus dalam rangka untuk mewujudkan visi Kabupaten Kudus yaitu Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas, dan Sejahtera. Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Y Q S

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Perangkat Daerah yang Jawab	Lokasi
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	1.1.00.4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	100%	100%													Bagian Tapem	
		1.1.00.4.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya perjanjian dinas	12 Bulan	12 Bulan														
		1.1.00.4.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materi yang tersedia	100 Buah	100 Buah														
		1.1.00.4.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	10 Unit	10 Unit														
		1.1.00.4.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas terawat dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4 Unit	4 Unit														
		1.1.00.4.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah PHD dan panitia pelaksana kegiatan yang terbayar	6 Orang	6 Orang														
		1.1.00.4.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan														
		1.1.00.4.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggantian	Tersedianya barang cetakan dan penggantian	12 Bulan	12 Bulan														
		1.1.00.4.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya koran	12 Bulan	12 Bulan														
		1.1.00.4.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum pegawai dan snack rapat	12 Bulan	12 Bulan														

APK

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD	
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1.1.00.4.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya perjalanan dinas	12 Bulan	12 Bulan												
Meningkatkan kinerja efektifitas serta akuntabilitas penda	Tertaksananya pelayanan tugas Sekda	1.1.00.4.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhiya kebutuhan sarana prasarana aparatur	100%	100%												
		1.1.00.4.01.02.24	Pemeliharaan rutin/bekala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	4 Unit	4 Unit												
Meningkatkan kinerja pelayanan tugas Sekda	Tertaksananya pelayanan tugas Sekda	1.1.00.4.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	100%	100%												
		1.1.00.4.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan lkhitar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja	1 dok	1 dok												
Meningkatkan fasilitas penyelenggaraan Penlitur	Meningkatkan fasilitas penyelenggaraan penlitur umum	1.1.05.4.01.21	Program pendidikan politik masyarakat	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan penlitur umum	10 Buku	10 Buku												
		1.1.05.4.01.21.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Buku laporan pkkada	10 Buku	10 Buku												
Meningkatkan kelancaran informasi kebijakan Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat	Terwujudnya penyebutan informasi kepada masyarakat	2.2.10.4.01.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	Jumlah publikasi yang diterbitkan melalui media massa	2 Kali	2 Kali												
		2.2.10.4.01.18.01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Penayangan LPPD di media massa	2 Kali	2 Kali												

af
14/10

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Mewujudkan peningkatan pelayanan pelayanan kedinasan KDH/wakil KDH ;	Meningkatnya pelayanan pelayanan kedinasan KDH/wakil KDH	4.4.01.4.01.16	Program peningkatan pelayanan pelayanan kedinasan KDH/wakil kepala daerah/ wakil kepala daerah	Jumlah fasilitasi penerimaan kunjungan kerja	25 Kali	25 Kali														
			Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kudus	-	1 Kali															
		4.4.01.4.01.16.02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Jumlah rapat koordinasi	3 Kali	3 Kali														
				Jumlah fasilitasi penerimaan kunjungan kerja	55 Kali	45 Kali														
		4.4.01.4.01.16.04	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Jumlah rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	3 Kali	2 Kali														
		4.4.01.4.01.16.07	Fasilitasi Kegiatan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kudus periode 2018-2023	-	1 Kali														
Mewujudkan peningkatan pelayanan pelayanan kedinasan KDH/wakil KDH ;	Meningkatnya pelayanan pelayanan kedinasan KDH/wakil KDH	4.4.01.4.01.20	Program peningkatan pelayanan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah kecamatan yang terfimb administrasi	9 Kec	9 Kec														
		4.4.01.4.01.20.03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah evaluasi kinerja kecamatan	9 kec	9 kec														

Y
Rk

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja SKPD Perangkat Daerah Jawa Barat	Lokasi				
					Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019			Tahun-2 2020			Tahun-3 2021			Tahun-4 2022			Tahun-5 2023			Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD			
							2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target			Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kerjasama pembangunan;	Terciptanya koordinasi dan fasilitasi kerjasama pembangunan;	4.4.01.4.01.25	Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah	100%	0 persen																			
		4.4.01.4.01.25.03	Fasilitasi/pembinaan kerjasama antar daerah di bidang hukum	Jumlah batas wilayah desa yang berbatasan dengan kabupaten lain	100%	0 persen																			
Meningkatkan kesadaran dan ketepatan terhadap peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan	4.4.01.4.01.26	Program Penataan Peraturan perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan (Bag. Tata Pemerintahan)	1 Kali	-																			
		4.4.01.4.01.26.04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	1 Kali	-																			
Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kerjasama pembangunan;	Terciptanya koordinasi dan fasilitasi kerjasama pembangunan;	4.4.03.4.01.16	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah buku laporan pelaksanaan kerjasama	10 Buku	10 Buku																			
		4.4.03.4.01.16.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah buku laporan pelaksanaan kerjasama	10 Buku	10 Buku																			
Meningkatkan koordinasi dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;	Meningkatnya koordinasi dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;	4.4.03.4.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen kinerja daerah	1 Dok	1 Dok																			
		4.4.03.4.01.21.12	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPDJ)	Jumlah LPPD yang tersusun	1 dok	1 dok																			

100%

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD				
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Meningkatkan Efektivitas Akuntabilitas Pemerintahan Daerah				Nilai SAKIP		68,19	70,50		72,50		75,00		81,00		83,00		83,00				
				Nilai L.PPD	ST (3,49)	ST (3,19)	ST (3,20)		ST (3,21)		ST (3,22)		ST (3,23)		ST (3,24)		ST (3,24)				
				Angka Inflasi Daerah	4,17	3,11	3,5+/-1%		3,5+/-1%		3,5+/-1%		3,5+/-1%		3,5+/-1%		3,5+/-1%				
				Indeks reformasi birokrasi		67,05	69,17		74		79		85		90		90				
				Persentase capaian kinerja bidang pemerintahan			80%		80,5%		81%		81,5%		82%		82%				
Meningkatnya sinergitas kebijakan daerah		4.01.01.07	Program Pelayanan Administrasi dan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah		80%	81,5%	209.717	82%	201.480	83%	202.434	83,5%	202.606	85%	202.412	85%	1.016.648	Bagian Ttapem		
		4.01.01.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai standart			1 dok	5.000	1 dok	2.500	1 dok	2.500	1 dok	2.500	1 dok	2.500	5 dok	15.000			
		4.01.01.07.02	Pelayanan Administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun sesuai standar			1dok	174.717	1dok	168.980	1dok	169.934	1dok	170.106	1dok	169.912	5 dok	853.649			
				Jumlah dokumen perencanaan dan laporan PD sesuai standar			6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		30 dok				
		4.01.01.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuan			16 dok	30.000	16 dok	30.000	16 dok	30.000	16 dok	30.000	16 dok	30.000	80 dok	150.000			

186

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah kerjasama daerah yang mencapai pendatarangan MoU			5 dok		5 dok		5 dok		5 dok		5 dok		25 dok			
Meningkatkan koordinasi dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;		4.01.35	Program Fasilitasi Tata Pemerintahan	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Bagian Pemerintahan	
				persentase fasilitasi kerjasama daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		4.01.35.01	Fasilitasi Pemerintahan Daerah					81.456		96.383		445.000		560.000		670.000		1.852.839		
				Jumlah kecamatan yang difasilitasi pemerintahan sesuai ketentuan	9 kec	9 kec	9 kec		9 kec		9 kec	35.000,00	9 kec	40.000,00	9 kec	45.000,00	9 kec	120.000,00		
				Jumlah pemetaan batas wilayah desa/keurahan	0 titik	0 titik	-		-		450 titik	250.000,00	450 titik	300.000,00	450 titik	350.000,00	1350 titik	900.000,00		
				Jumlah pelaksanaan pengesahan batas wilayah dengan kabupaten tetangga	0 pkt	0 pkt	-		-		1 pkt	150.000,00	1 pkt	200.000,00	1 pkt	250.000,00	3 pkt	600.000,00		
				Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan bidang pemerintahan yang tersusun	-	-	-		-		2 ranperbu p	10.000,00	2 ranperbu p	20.000,00	2 ranperbu p	25.000,00	6 ranperbu p	55.000,00		
		4.01.35.02	Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Kerjasama					175.000		150.000		290.000		340.000		385.000		1.340.000		

4
pk

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																					
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Rensitra SKPD		Unit Kerja SKPD Perangkat Daerah Jawa Barat	Lokasi	
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
				Jumlah dokumen LPD yang tersusun dan terbit di media massa sesuai ketentuan	1 dok	1 dok	2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		10 dok			20	21
1	2	3	4																		
				Jumlah dokumen LPD yang tersusun dan terbit di media massa sesuai ketentuan		1 dok															
				Jumlah dokumen pelaksanaan pilkada yang tersusun			5 dok		5 dok		5 dok		5 dok		5 dok		25 dok				
				Jumlah kerjasama daerah yang mencapai pendanaan MoU																	
				Jumlah dokumen LKPD yang tersusun sesuai ketentuan	-	-	-		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		4 dok				
				Jumlah Fasilitas Kunjungan Kerja yang terlayani																	
				SK Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang tepat waktu	-	1 dok	-		-		-		-		-		1 dok				
				Jumlah Laporan SPM yang di terapkan	-	-	-		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		4 dok				
Meningkatnya Kinerja pelayanan tugas bagian akuntabilitas bagian Hukum	Tertaksananya Pelayanan Tugas Bagian Hukum		1.0.1.20.03.1	Program pelayanan administrasi umum	Cakupan pelayanan administrasi umum														Bagian Hukum		

106

Target Kerja Program dan Kerangka Pendanaan																					
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Awal Perencanaan															Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD						
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1.0.1.20.03.1.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	11 kl	12 bl															
		1.0.1.20.03.1.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggarakannya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7 unit	7 unit															
		1.0.1.20.03.1.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggarakannya administrasi keuangan	12 org	12 bl															
		1.0.1.20.03.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	937 bh	12 bl															
		1.0.1.20.03.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	31480 ltr	12 bl															
		1.0.1.20.03.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peralatan perUan	Tersedianya bahan bacaan dan peralatan perUan	27 bk/mjln	12 bl															
		1.0.1.20.03.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai	3568 dos	12 bl															
		1.0.1.20.03.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Terselenggarakannya koordinasi dan konsultasi	78 oh	12 bl															
		1.0.1.20.03.02	Program peningkatan sarana dan prasarana																		
		1.0.1.20.03.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	7 unit	7 unit															
		1.0.1.20.03.2.25	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya sarpras gedung kantor	10 kl	4 unit															

196

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD					
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		1.0.1.20.03.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala meubelur	terpeliharanya meubelur kantor	5 unit	5 unit																
		1.1.20.1.20.03.20	Program Penataan peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum dan Penegakan Perda	Presentase penanganan kasus pengaduan di lingkungan Penda	100%	100%																
			Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Presentase Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	100%	100%																
		1.1.20.1.20.03.26		Jumlah draft Produk Hukum yang tersusun dan terdistribusikan	130 draft, 1460 bk	130 draft, bk																
				Jumlah Sosialisasi ketentuan cukai	0 kl	0 kl																
				Persentase capaian kinerja bidang pemerintahan	80%	80,5%																
	Meningkatnya sinergitas kebijakan daerah	4.4.01.03.1.00.07	Program Pelayanan administrasi umum	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	83,37%	83,5%		139.544	84%	134.063	84,5%	134.698	85%	134.813	85,5%	133.352	85,5%	676.470	Bagian Hukum			
		4.4.01.03.1.00.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standar	1dok	1dok		88.360	1dok	88.360	1dok	88.360	1dok	88.475	1dok	88.475	1dok	442.030				
				Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD sesuai standar	6 dok	6 dok			6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok					

496

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4.4.01.03.1.00.07.03	Peningkatan Kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparat	Tersedianya Sarpras dan Peningkatan Kapasitas Aparatur				51.184		45.703		46.338		46.338		44.877		234.440		
				Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuan			16 dok		16 dok		16 dok		16 dok		16 dok		16 dok			
				Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan			60 dok		60 dok		60 dok		60 dok		60 dok		60 dok			
				Jumlah ASN yang komplet			11 org		11 org		11 org		11 org		11 org		11 org			
		1.4.01.03.4.01.36	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, dan Penegakan HAM					693.309		666.077		669.232		669.801		662.546		3.360.965	Bagian Hukum	
				Presentase Penataan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyelesaian penanganan kasus Penda		87%	85%		87%		88%		89%		90%		91%			
				Persentase peningkatan produk hukum daera yang diinformasikan		87%	95%		95%		96%		97%		97%		97%			
		1.4.01.03.4.01.36.01	Facilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah rancangan peraturan perUan yang tersusun			130 draft	160.230	130 draft	160.230	130 draft	160.500	130 draft	160.230	130 draft	160.230	130 draft	801.420		

806

[illegible]

AK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD				
							2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Jumlah barang cetakan dan penggantian			250 buah, 23.575 lembar	6.227													
				Jumlah makan dan minum			3396 OH	13.186													
				Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			81 OH	30.000													
				Jumlah buku bacaan peraturan perUUan			60 buku	12.000													
		4.01.03.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuan			8 dok	51.184									8 dok	51.184			
				Jumlah dokumen pengelolaan asset yang tersusun sesuai ketentuan			10 dok										10 dok				
				Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor			18 unit	2.400	12 bulan		12 bulan		12 bulan			12 bulan					
				Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas			7 unit	50.000	12 bulan		12 bulan		12 bulan			12 bulan					
				Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin			10 unit	33.943	12 bulan		12 bulan		12 bulan			12 bulan					
		4.01.03.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang tersusun sesuai standar			7 dok	12.900	7 dok	12.900	7 dok	12.900	7 dok	12.900	7 dok	12.900	7 dok	51.500			
				Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			4 orang	12.000	4 orang	12.000	4 orang	12.000	4 orang	12.000	4 orang	12.000					
				Jumlah barang cetakan dan penggantian			4500 lembar	900	4500 lembar	900	4500 lembar	900	4500 lembar	900	4500 lembar	900					

18

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023			Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD			
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4.01.03.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuan					8 dok	124.144	8 dok	144.000	8 dok	157.700	8 dok	162.500	8 dok	588.344			
				Jumlah dokumen pengelolaan asset yang tersusun sesuai ketentuan					10 dok		10 dok		10 dok		10 dok		10 dok				
				Jumlah Alat Tulis Kantor				15 jenis	12.481	25 jenis	20.614	25 jenis	20.614	25 jenis	20.614	20.614					
				Jumlah jasa surat menyurat dan materi				3 jenis	1.000	3 jenis	1.500	3 jenis	1.500	3 jenis	1.500	3 jenis	1.500				
				Jumlah bahan bacaan/berlangganan surat kabar				2 jenis	4.800	2 jenis	4.800	2 jenis	4.800	2 jenis	4.800	2 jenis	4.800				
				Jumlah Perawatan peralatan dan perlengkapan kantor				18 unit	10.633	18 unit	10.633	18 unit	10.633	18 unit	10.633	18 unit	10.633				
				Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas				7 unit	43.960	7 unit	42.880	7 unit	52.900	7 unit	57.700						
				Jumlah barang cetakan dan pengandaan				125 bh, 21.750 lbr	5.175	125 bh, 35265 lbr	7.350	125 bh, 36750 lbr	10.503	125 bh, 36750 lbr	10.503						
				Jumlah makan dan minum				3403 OH	8.470	3403 OH	8.470	3403 OH	8.250	3403 OH	8.250						
				Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				90 OH	24.500	90 OH	30.753	90 OH	30.500	90 OH	30.500						
				Jumlah buku bacaan peraturan perUuan				40 buku	12.000	40 buku	12.000	50 buku	17.000	50 buku	17.000						

1 PK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
					Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD					
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4.01.03.36	Program Penataan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan penanganan kasus HAM	Prosentase penataan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyelesaian penanganan kasus Panda		87%	85%	693.309	87%	725.779	86%	733.923	89%	733.923	90%	733.923	90%	733.923	90%	3.620.857	Bagian Hukum	Bagian Hukum
		4.01.03.36.01	Fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perUlan	Jumlah rancangan peraturan perUlan yang tersusun		87%	95%		95%		96%		97%		97%		97%					
		4.01.03.36.02	Pengkajian dan publikasi peraturan perUlan	Jumlah Himpunan Peraturan Daerah dan Himpunan Peraturan Bupati yang dicetak dan dipublikasikan			760 buku	127.152	760 buku	159.852	760 buku	167.996	760 buku	167.996	760 buku	167.996						
		4.01.03.36.03	Fasilitasi penanganan masalah hukum dan penegakkan HAM	Persentase pelanggaran/ perkara Panda			6 kasus	405.927	3 kasus	405.927	6 kasus	405.927	6 kasus	405.927	6 kasus	405.927						
				Jumlah Masyarakat yang menerima sosialisasi peraturan perUlan bidang cukai			450 orang		200 org		450 orang		450 orang		450 orang		450 orang					
				Jumlah Dokumen Rarahan yang dilaporkan			2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok					

196

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																						
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan															Unit Kerja SKPD Perangkat Daerah	Lokasi	
					2017		2018		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5			100%												20	21		
1. Menentukan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus dalam optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah.	terlaksananya pelayanan tugas Seida	1.1.00.4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran															Bagian Kesra			

196

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penerima ng Jawab	Lokasi
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Menentukan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus dalam optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah.	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas, BBM dan Suku Cadang	1.1.00.4.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpentingnya kebutuhan sarana prasarana aparatur		100%														
		1.1.00.4.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pengadaan pemeliharaan kendaraan dinas, BBM dan Suku Cadang		100 persen														
		1.1.00.4.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pengadaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor		100 persen														
1. Menentukan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus dalam optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah.	Facilitasi kegiatan upacara peningkatan hari besar nasional	1.1.05.4.01.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan*	Jumlah pembinaan FKUB, FPBI dan pendidikan wawasan kebangsaan		5 Kali														
				Jumlah kegiatan upacara hari besar nasional		Rim														
		1.1.05.4.01.17.04	Facilitasi Peningkatan Pengembangan Nasionalisme Kebangsaan	Terselenggaranya kegiatan upacara Hari Besar Nasional tingkat Kabupaten Kudus		305 Org														
				Jumlah peserta kegiatan pengembangan wawasan		305 Org														
1. Menentukan arah kebijakan Sekretariat	Tercapainya toleransi beragama	1.1.06.4.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi	Jumlah PKMS yang terdata		5000 Org														

4
PR

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Kabupaten Kudus dalam optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah.	Tercapainya toleransi beragama antar umat beragama		Kesejahteraan Sosial	Jumlah pusat informasi penyandang cacat dan trauma center		1 Unit														
				Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelatihan keterampilan		450 Org														
				Jumlah kegiatan upacara hari besar dan fasilitasi resepsi kenegaraan		4 Kgt														
		1.1.06.4.01.16.13	Koordinasi kegiatan Pelayanan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan	Terselenggaranya kegiatan upacara hari besar nasional tingkat kabupaten		4 kegiatan														
5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Kudus.	Tercapainya toleransi beragama antar umat beragama	1.1.06.4.01.22	Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama	Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan		100%														
				Jumlah peserta Dialog Antar umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa		445 Org														
				Tingkat intensitas dan peran dalam melaksanakan ibadah agama		90%														

4
P
S

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pelaksanaan Hisab dan Rakyat, penentuan arah kiblat dan pembuatan jadwal imsakiyah dan sholat fardlu		4 Kgt														
				Jumlah pengajian selapangan		12 Kgt														
				Jumlah penyaluran hibah dan Bansos keagamaan		12 Kgt														
				Konsultasi dan Penyuluhan antar tokoh-tokoh beragama		445 Orang														
				1.1.06.4.01.22.02 Fasilitasi Pelaksanaan Hisab dan Rukyat		4 kegiatan														
				1.1.06.4.01.22.03 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan		12 kegiatan														
				terfasilitasinya penyaluran hibah dan bansos keagamaan		12 kegiatan														
				Meningkatnya kinerja penyelenggara an bidang ekonomi, pembangunan dan kesra		80%			80,5%		81%		81,5%		82%		82%			

40

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																					
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja SKPD Perangkat Daerah	Lokasi
					Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD				
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4.01.03.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		80%	81,5%	235.768	82%	226.507	83%	227.580	83,5%	227.774	85%	225.307	85%	1.142.936	Bagian kesra		
			Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Jumlah laporan yang tersusun sesuai standar			6 dok	2.100	6 dok	2.100	6 dok	2.100	6 dok	2.100	6 dok	2.100	6 dok				
			Pelayanan administrasi dan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standar			1dok	27.600	1dok	37.200	1dok	37.200	1dok	37.200	1dok	37.200	1dok				
				Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD sesuai standar			6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok				
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuan			16 dok	206.068	16 dok	187.207	16 dok	188.280	16 dok	188.474	16 dok	186.007	16 dok				
				Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan			60 dok		60 dok		60 dok		60 dok		60 dok		60 dok				
				Jumlah ASN yang kompeten			12 org		12 org		12 org		12 org		12 org		12 org				
			Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	1 terfasilitasinya kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan		100%	100%	2.058.124	100%	76.144.034	100%	77.353.080	100%	78.554.714	100%	79.733.509	100%	313.843.861	Bagian kesra		
			Facilitasi dan peningkatan kesejahteraan sosial	Jumlah fasilitas khoto, iman dan marbot masjid, iman musthola dan tempat ibadah lainnya			2 kali	75.000	2 kali	73.152.675	2 kali	73.152.675	2 kali	73.152.675	2 kali	73.152.675	2 kali				

192

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																					
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan															Unit Kerja SKPD Perangkat Daerah	Lokasi
					Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD						
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Jumlah guru non prs madya, bpq, diajarkan dan FPPMS			7352 org		7352 org		7352 org		7352 org		7352 org		7352 org				
			Facilitasi Kegiatan Keagamaan	Jumlah fasilitasi Kegiatan Keagamaan			25 keg	1.983.124	25 keg	2.991.359	25 keg	4.200.405	25 keg	5.402.039	25 keg	6.581.234	25 keg				
				Persentase capaian kinerja bidang ekhang kesra			80%		80,5%		81%		81,5%		82%		82%				
Meningkatkan Efektivitas Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sinergitas pelaksanaan kebijakan daerah																				
		4.01.03.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		80%	81,5%	235.768	82%	224.407	83%	227.580	83,5%	227.774	85%	225.307	85%	1.142.936	Bagian Kesra		
			Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Jumlah laporan yang tersusun sesuai standar			6 dok	2.100	0	-	0	-	0	-	0	-	6 dok				
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standar			1dok	27.500	1dok	37.200	1dok	37.200	1dok	37.200	1dok	37.200	1dok				
				Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD sesuai standar			6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok				
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuan			16 dok	206.068	16 dok	187.207	16 dok	188.280	16 dok	188.474	16 dok	186.007	16 dok				
				Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan			60 dok		60 dok		60 dok		60 dok		60 dok		60 dok				
				Jumlah ASN yang kompeten			12 org		13 org		13 org		13 org		13 org		12 org				

192

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Perangkat Daerah	Lokasi
					Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD			
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah guru non pns madin, tpq, dakonla dan FPPMS			7352 org		7352 org		7352 org		7352 org		7352 org		7352 org			
			Facilitasi Kegiatan Keagamaan	Jumlah fasilitasi Kegiatan Keagamaan			25 keg	1.983.124	25 keg	2.991.359	25 keg	4.200.405	25 keg	5.402.039	25 keg	6.581.234	25 keg			
Meningkatkan Efektivitas pelaksanaan kebijakan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sinergitas pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah			Persentase capaian kinerja bidang ekdang kesra			80%		80,5%		81%		81,5%		82%		82%			
		4.01.03.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan mas/arakat atas kinerja Perangkat daerah)		80%	81,5%	235.768	82%	224.407	83%	227.580	83,5%	227.714	85%	225.307	85%	1.142.936	Bagian kesra	
			Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Jumlah laporan yang tersusun sesuai standar			6 dok	2.100	0	-	0	-	0	-	0	-	6 dok			
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standar			1dok	27.600	1dok	37.200	1dok	37.200	1dok	37.200	1dok	37.200	1dok			
				Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD sesuai standar			6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok			
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuan			16 dok	206.068	16 dok	187.207	16 dok	188.280	16 dok	188.474	16 dok	186.007	16 dok			
				Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan			60 dok		60 dok		60 dok		60 dok		60 dok		60 dok			
				Jumlah ASN yang kompeten			12 org		13 org		13 org		13 org		13 org		12 org			

196

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																					
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan															Unit Kerja SKPD Perangkat Daerah	Lokasi
					Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD						
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Tertfasilitasinya kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan		100%	100%	2.058.124	100%	76.144.034	100%	77.353.080	100%	78.554.714	100%	79.733.909	100%	313.843.861	Bagian Kesra		
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Kegiatan (pengajian, selapanan dan manaqib, Kegiatan PHBI, Kegiatan Pemberangkatan dan Penulangan Ibadah Haji (PPIH) Kabupaten Kudus, Hisab Rukyat dan MTO)			25 keg	1.993.124	25 keg	2.991.359	25 keg	4.200.405	25 keg	5.402.039	25 keg	6.581.234	25 keg				
			Fasilitasi dan peningkatan kesejahteraan sosial																		
			Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen tanda terima honor guru keagamaan dan jumlah dokumen pelaporan kegiatan kesejahteraan sosial			2 kali	75.000	2 kali	73.152.675	12 dok	73.152.675	12 dok	73.152.675	24 dok	73.152.675	12 dok				
				Jumlah guru swasta keagamaan			7352 org		7352 org		7352 org		7352 org		7352 org		7352 org				
			Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen pelaporan kegiatan kesejahteraan masyarakat							4 dok	35.929.000	4 dok	35.929.000	4 dok	35.929.000	4 dok				

19/10

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Unit Kerja SKPD Pangung JawaB	Lokasi
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD				
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan bidang ekonomi, pembangunan dan kesra	4.01.03.07	Program Pelayanan Administrasi Umum	Persentase capaian kinerja bidang ekhang kesra			80%		80,5%		81%		81,5%		82%		82%				
		4.01.03.07		Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran dan terpenuhnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	152.916	100%	146.910	100%	147.606	100%	147.731	100%	146.131	100%	741.233	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan		
		4.01.03.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standar			1 dok	97.616	1 dok	94.910	1 dok	95.000	1 dok	95.000	1 dok	94.000	5 dok	476.526			
		4.01.03.07.03	Peningkatan Kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD sesuai standar			6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		30 dok				
				Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuan			16 dok	55.300	16 dok	52.000	16 dok	52.606	16 dok	52.731	16 dok	52.131	80 dok	264.768			
				Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan			60 dok		60 dok		60 dok		60 dok		60 dok		300 dok				
		4.01.03.38	Prosentase pelaksanaan rekomendasi TPPD	Jumlah ASN yang komplein			9 org	210.000	9 org	201.752	9 org	202.707	9 org	202.860	9 org	200.682	9 org	1.018.020	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan		
					80%	81%			82%		83%		84%		85%		85%				

486

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD				
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Prosentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD		12%		5%		6%		7%		8%		9%		35%				
			Persentase realisasi kegiatan pembangunan yang tepat waktu		86%		88%		88,5%		89%		90%		90%		90%				
		4.01.03.38.01	Pengelolaan Perencanaan Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Ekunda, TPD dan TPAKD			11 dok	110.000	11 dok	121.752	11 dok	122.707	11 dok	122.880	11 dok	120.692	11 dok	598.021			
				Jumlah dokumen pelaporan realisasi penggunaan DBHCHT			12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok				
				Jumlah Perusda dengan hasil Audit WTP			5 perusda		5 perusda		5 perusda		5 perusda		5 perusda		5 perusda				
		4.01.03.38.02	Pengelolaan administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen pelaporan realisasi kegiatan dan dan keuangan PD			12 dok	100.000	12 dok	80.000	12 dok	80.000	12 dok	80.000	12 dok	80.000	12 dok	420.000			
				Jumlah Dokumen Pelaporan Kegiatan Bangub			1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok				
		4.01.03.07	Program Pelayanan Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah	88,03%		81,5%	152.916	82%	135.000	83%	140.000	83,5%	148.000	85%	148.000	85%	723.916	Bagian Perekonomian		
		4.01.03.07.02	Pelayanan administrasi dan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standar	1 dok		1 dok	97.616	1 dok	16.300	1 dok	19.300	1 dok	19.300	1 dok	19.300	5 dok	171.816			
				Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD sesuai standar	6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		30 dok				

482

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
					Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019					Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023				Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD	
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target			Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4.01.03.07.03	Peningkatan Kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuan		12 dok	16 dok	55.300	12 dok	118.700	12 dok	120.700	12 dok	128.700	12 dok	128.700	60 dok	552.100					
				Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan		2 dok	2 dok		2 dok		2 dok	2 dok	2 dok		2 dok		10 dok						
				Jumlah ASN yang kompeten		9 org	9 org		9 org		9 org	9 org	9 org		9 org		9 org						
		4.01.03.38	Program Pengelolaan Perencanaan dan Administrasi Pembangunan	Persentase pelaksanaan rekomendasi TPID		100%	81%	210.000	82%	201.752	83%	202.707	84%	202.880	85%	200.682	85%	1.018.020	Bagian Perencanaan				
				Persentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD		31,23%	5%		6%		7%	8%		9%		35%							
				Persentase realisasi kegiatan pembangunan yang tepat waktu		89%	88%		88,5%		89%	90%		90%		90%							
		4.01.03.38.01	Pengelolaan Perencanaan Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Ekumda, TPID dan TPAKD		11 dok	11 dok	110.000	11 dok	121.752	11 dok	122.707	11 dok	122.880	11 dok	120.682	11 dok	588.021					
				Jumlah dokumen pelaporan realisasi penggunaan DBH/CHT		12 dok	12 dok		4 dok		4 dok	4 dok		4 dok		4 dok							
				Jumlah Perusa dengan hasil Audit WTP		5 perusa	5 perusa		5 perusa		5 perusa	5 perusa		5 perusa		5 perusa							
		4.01.03.38.02	Pengelolaan administrasi pembangunan	Jumlah dokumen pelaporan realisasi kegiatan dan keuangan PD		12 dok	12 dok	100.000	12 dok	80.000	12 dok	80.000	12 dok	80.000	12 dok	80.000	12 dok	420.000					
				Jumlah Dokumen Pelaporan Kegiatan Bangun		1 dok	1 dok		1 dok		1 dok	1 dok		1 dok		1 dok							

40

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																						
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Peninggung Jawab	Lokasi		
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16
		4.01.03.37	Program peningkatan perekonomian daerah	Prosentase pelaksanaan rekomendasi TPID					82%	110.000	83%		84%	110.000	85%	110.000	85%	435.000	Bagian Perencanaan			
				Prosentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD					6%		7%		8%		9%		35%					
		4.01.03.37.01	Pengembangan Perekonomian Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Ekuinda, TPID dan TPAKD					11 dok	80.000	11 dok	75.000	11 dok	80.000	11 dok	80.000	11 dok	315.000				
				Jumlah dokumen pelaporan realisasi penggunaan DBHCHT					12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok					
		4.01.03.37.02	Pembinaan BUMD dan BLUD	Jumlah Perusahaan dengan hasil audit WTP					5 perusda	30.000	5 perusda	30.000	5 perusda	30.000	5 perusda	30.000	5 perusda	120.000				
Meningkatkan arah kegiatan untuk melejitkan bidang perekonomian dan pemerintahan daerah yang mampu memberikan kerangka regulasi dan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam program kerja.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan bidang perekonomian dan pembangunan	4.01.4.01.03.07	Program pelayanan administrasi umum						82%	16.000	83%	16.000	83,5%	20.000	85%	20.000	85%	72.000	Bagian Administrasi Pembangunan			
		4.01.4.01.03.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	-	-	-	-	82%	16.000	83%	16.000	83,5%	20.000	85%	20.000	85%	72.000				

402

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Pengang JawaB	Lokasi
					Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja Akhir periode Renstra SKPD			
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Tersedianya honorarium PNS pengelola kegiatan/keuangan PD					6 org		5 org		5 org		5 org			-		
		4.01.4.01.03.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuan	-		-	-	12 dok	84.000	12 dok	84.000	12 dok	100.000	12 dok	100.000		368.000		
				Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan					2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		8 dok	-		
				Jumlah belanja sarana dan prasarana aparatur					14 jenis		14 jenis		14 jenis		14 jenis			-		
				Jumlah sarana dan prasarana aparatur kantor yang tersedia														-		
		4.01.4.01.03.45	Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan	Presentase penyusunan program pembangunan daerah yang tepat waktu			-	-	88,5%		89%		90%		90%		90%	-		
				Presentase realisasi kegiatan pembangunan yang tepat waktu			-	-	88,5%		89%		90%		90%		90%			
		4.01.4.01.03.45.01	Penyusunan program pembangunan daerah	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah (Renstra, Renja, RKPD dan KUA PPAS Setda)	-	86%	88%	-	88,5%		89%		90%		90%		90%			
		4.01.4.01.03.45.02	Presentase realisasi kegiatan pembangunan yang tepat waktu	Jumlah dokumen laporan realisasi kegiatan dan keuangan PD	-	-	-	-	4 dok	40.000	4 dok	40.000	4 dok	40.000	4 dok	40.000		160.000		
				Jumlah dokumen pelaporan kegiatan	-	-	-	-	12 dok	80.000	12 dok	130.000	12 dok	110.000	12 dok	110.000		430.000		
				Jumlah dokumen pelaporan kegiatan BanGub	-	-	-	-	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok				

4
9
2

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD				
1	2	3	4	5	2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	20	21	
				Jumlah dokumen LKIP/SAKP, LPPD, LKP Selda Sistem Informasi Pelaporan Perkembangan Kegiatan OPD																	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Meningkatkan penyelenggaraan tata pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien	Meningkatnya kinerja efektifitas an serta akuntabilitas pemerintah daerah	1.1.00.4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bin	12 bin														Bagian Pengadaan Barang/Jasa	
		1.1.00.4.01.01.0	Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya jasa surat menyurat	12 bin	12 bin															
		1.1.00.4.01.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasion al	terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	12 bin	12 bin															
		1.1.00.4.01.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terbayarnya honorarium pelaksanaan kegiatan dan lembur rutin PNS	12 bin	12 bin															
		1.1.00.4.01.01.0	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya biaya service dan pembelian sparepart peralatan kantor	12 bin	12 bin															
		1.1.00.4.01.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	12 bin	12 bin															
		1.1.00.4.01.01.0	Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya jasa surat menyurat	12 bin	12 bin															

100

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penang gung Jawa	Lokasi
					Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD			
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.1.00.4.01.01.0	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	terfasananya service peralatan dan perlengkapan kantor	12 bin	12 bin														
		3																		
		1.1.00.4.01.01.1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bin	12 bin														
		5																		
		1.1.00.4.01.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan lainu kantor	12 bin	12 bin														
		7																		
		1.1.00.4.01.01.1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya koordinasi dan konsultasi perencanaan pelaksanaan pembangunan	12 bin	12 bin														
		8																		
		1.1.00.4.01.01.1	Penyediaan barang celakan dan penggandaan	Tersedianya barang celakan dan penggandaan	12 bin	12 bin														
		1																		
		1.1.00.4.01.01.0	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	terfasananya service peralatan dan perlengkapan kantor	12 bin	12 bin														
		3																		
		1.1.00.4.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terperuhnya kebutuhan sarana prasarana aparatur	12 bin	12 bin														
		1.1.00.4.01.02.0	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bin	12 bin														
		9																		
		1.1.00.4.01.02.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	12 bin	12 bin														
		4																		
		1.1.00.4.01.02.2																		

896

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja SKPD Penang gung Jawa	Lokasi
					Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD				
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Meningkatkan profesionalitas me dan kemampuan aparat	meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarpras aparat	1.1.00.4.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparat	Meningkatnya kapasitas aparat	12 bln	12 bln															
		1.1.00.4.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan sumber daya aparat melalui pendidikan dan pelatihan	12 bln	12 bln															
Meningkatkan penyelenggaraan administrasi pembangunan yang handal	Meningkatnya terlb administrasi pelaksanaan pembangunan	4.4.01.4.01.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase pengendalian, Monev, dan pelaporan kegiatan SKPD Persentase penanganan kasus pengaduan di lingkungan penda Persentase penyelesaian TLHP Reguler Persentase penyelesaian penanganan kasus Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektoral Propinsi Persentase sistem informasi jasa konstruksi Fasilitasi proses pengadaan barang/jasa Lama proses perjanjian Usaha Jasa Konstruksi Jumlah kecamatan yang terlb administrasi	12 bln	12 bln															

1
PRL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD				
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Terlaksananya raker POK, penyusunan dokumen money kegiatan, pemeliharaan aplikasi pelaporan, pelaksanaan money kegiatan SKPD																	
		3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Rekomendasi permohonan IUJK dan pembinaan jasa konstruksi, sosialisasi regulasi jasa konstruksi	12 bin	12 bin															
		4.4.01.4.01.20.09	Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	tersedianya sarana prasarana pendukung ULP dan pelaksanaan pengadaan barang / jasa ULP	12 bin	12 bin															
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan bidang ekonomi, pembangunan dan kesra			Persentase capaian kinerja bidang ekhang kesra			80%		80,5%		81%		81,5%		82%		82%				
		4.01.4.01.03.07	Program Pelayanan Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah		80%	81,5%	307.310	82%	295.239	83%	296.538	83,5%	296.890	85%	293.574	85%	1.489.752	Bagian Pengadaan Barang/Jasa		
		4.01.4.01.03.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standar			1 dok	136.500	1 dok	131.239	1 dok	132.638	1 dok	131.890	1 dok	130.674	5 dok	662.941			
				Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD sesuai standar			6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		30 dok				
		4.01.4.01.03.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparat	Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuan			16 dok	170.810	16 dok	164.000	16 dok	164.000	16 dok	165.000	16 dok	163.000	80 dok	826.810			

7

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan			60 dok		60 dok		60 dok		60 dok		60 dok		300 dok			
				Jumlah ASN yang kompeten			15 org		15 org		15 org		15 org		15 org		15 org			
		4.01.4.01.03.40	Program Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase fasilitasi proses pengadaan barang/jasa sesuai standar pelayanan			86,79%	1.128.000	87%	1.083.694	86%	1.088.827	90%	1.088.754	95%	1.077.949	95%	5.468.224	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	
		4.01.4.01.03.40.01	Perencanaan dan Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah laporan dokumen yang tersusun sesuai standar			3 dok	178.000	3 dok	171.694	3 dok	171.827	3 dok	172.754	3 dok	170.949	15 dok	865.224		
		4.01.4.01.03.40.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah laporan dokumen yang tersusun sesuai standar			1 dok	950.000	1 dok	912.000	1 dok	917.000	1 dok	917.000	1 dok	907.000	5 dok	4.603.000		
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan serta akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan bidang perekonomian dan pembangunan	1.1.00.4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bin	12 bin													Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
		1.1.00.4.01.01.0	Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya jasa surat menyurat	12 bin	12 bin	12 bin	1.500	12 bin	1.500	12 bin	1.500	12 bin	1.500	12 bin	1.500	12 bin	7.500		
		1.1.00.4.01.01.0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasion al	terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	12 bin	12 bin	12 bin	15.000	12 bin	15.000	12 bin	16.000	12 bin	16.000	12 bin	17.000	12 bin	79.000		
		1.1.00.4.01.01.0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terbayarnya honorarium pelaksanaan kegiatan dan lembur rutin PNS	12 bin	12 bin	12 bin	11.700	12 bin	12.000	12 bin	40.000	12 bin	40.000	12 bin	40.000	12 bin	143.700		
		1.1.00.4.01.01.0	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhnya biaya service dan pembelian sparepart peralatan kantor	12 bin	12 bin	12 bin	-	12 bin	-	12 bin	188.850	12 bin	80.000	12 bin	-	12 bin	268.850		

Y
gk

[illegible]

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja SKPD Pengung Jawa	Lokasi			
					Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD					
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target			Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		1.1.00.4.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan	12 bin	12 bin	12 bin	30.600	12 bin	51.000	12 bin	75.000	12 bin	75.000	12 bin	75.000	12 bin	306.600				
Meningkatkan penyelenggaraan administrasi pembangunan yang handal	Meningkatnya tertib administrasi pembangunan	4.4.01.4.01.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase fasilitasi proses pengadaan barang/jasa sesuai standar pelayanan	12 bin	12 bin	12 bin		12 bin		12 bin		12 bin				12 bin					
				Persentase penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda																		
				Persentase penyelesaian TLHP Reguler																		
				Persentase penyelesaian penanganan kasus																		
				Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektoral Propinsi																		
				Persentase sistem informasi jasa konstruksi	12 bin	12 bin																
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 bin	12 bin		950.000														
				Lama proses perijinan Usaha Jasa Konstruksi																		
				Jumlah kecamatan yang tertib administrasi																		
				Tertaksananya rakor POK, penyusunan dokumen money kegiatan, pemeliharaan aplikasi pelaporan, pelaksanaan morev kegiatan SKPD	12 bin	12 bin																
		4.4.01.4.01.20.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala																			

896

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penang gung JawaB	Lokasi
					Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD			
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4.4.01.4.01.20.03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Rekomendasi pemohonan IULK dan pembinaan jasa konstruksi, sosialisasi regulasi jasa konstruksi	12 bln	12 bln														
		4.4.01.4.01.20.09	Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	tersedianya sarana prasarana pendukung UKPBJ dan pelaksanaan pengadaan barang / jasa ULP	12 bln	12 bln														
		4.01.4.01.03.40	Program Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase fasilitasi proses pengadaan barang/jasa sesuai standar pelayanan		80,79%	86,28%	1.128.000	87%	1.550.139	88%	1.543.334	90%	1.680.499	95%	1.835.009	95%	6.608.981	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
		4.01.4.01.03.40.01	Perencanaan dan Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah laporan dokumen yang tersusun sesuai standar			3 dok	178.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4.01.4.01.03.40.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah laporan dokumen yang tersusun sesuai standar			1 dok	950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4.01.4.01.03.40.04	Pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah peserta sosialisasi yang memahami aturan/keputusan tentang pengadaan Barang dan Jasa			-	-	175 orang	149.406	175 orang	135.755	180 orang	162.906	180 org	195.487	180 org	643.554		
		4.01.4.01.03.40.05	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jaa	Jumlah fasilitasi pengadaan Barang/Jasa			-	-	210 paket	1.059.277	220 paket	1.109.719	230 paket	1.160.161	240 paket	1.210.503	240 paket	4.539.760		
		4.01.4.01.03.40.06	Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Secara Elektronik	Jumlah unit kerja yang terfasilitasi pengadaan Barang/Jasa secara elektronik			-	-	71	341.456	71	297.860	71	357.432	71	428.918	71	1.425.666		

Y f h k

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																					
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja SKPD Penang gung Jawab	Lokasi
					Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD				
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan bidang ekonomi, pembangunan dan kesra			Persentase capaian kinerja bidang ekhang kesra			80%		80,5%		81%		81,5%		82%		82%				
		4.01.4.01.03.07	Program Pelayanan Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah		80%	81,5%	307.310	82%	295.239	83%	296.638	83,5%	296.890	85%	293.674	85%	1.489.752	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		
		4.01.4.01.03.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standar			1 dok	136.500	1 dok	131.239	1 dok	132.638	1 dok	131.890	1 dok	130.674	5 dok	662.941			
				Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD sesuai standar			6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		30 dok				
		4.01.4.01.03.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuan			16 dok	170.810	16 dok	164.000	16 dok	164.000	16 dok	165.000	16 dok	163.000	80 dok	826.810			
				Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan			60 dok		60 dok		60 dok		60 dok		60 dok		300 dok				
				Jumlah ASN yang kompeten			15 org		15 org		15 org		15 org		15 org		15 org				
		4.01.4.01.03.40	Program Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase fasilitasi proses pengadaan barang/jasa sesuai standar pelayanan		80,79%	86,28%	1.128.000	87%	1.083.694	88%	1.088.827	90%	1.089.754	95%	1.077.949	95%	5.468.224	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		
		4.01.4.01.03.40.01	Perencanaan dan Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah laporan dokumen yang tersusun sesuai standar			3 dok	178.000	3 dok	171.694	3 dok	171.827	3 dok	172.754	3 dok	170.949	15 dok	885.224			
		4.01.4.01.03.40.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah laporan dokumen yang tersusun sesuai standar			1 dok	950.000	1 dok	912.000	1 dok	917.000	1 dok	917.000	1 dok	907.000	5 dok	4.603.000			

496

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD				
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5															20	21	
		4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi	Meningkatnya kelancaran administrasi	12 bulan	12 bulan													Bagian Organisasi		
		4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur																	
		4.01.03.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	5 unit	5 unit															
		4.01.03.04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	12 bulan																
		4.01.03.05	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah rapat koordinasi pimpinan	11 kali	8 kali															
		4.01.03.06	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi	1 dok	1 dok															
		4.01.03.07	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen standar satuan harga	1 dok	1 dok															
		4.01.03.08	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah SKPD yang sudah di Ajah, ABK		10 OPD															

496

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Pengang gung Jawab	Lokasi
					Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD			
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah Perangkat Darah yang terevaluasi kelenbagaannya		3 OPD														
				Jumlah Maskah Akademik Perda OPD		1 dok														
				Jumlah Perda/P erbup OPD		1 dok														
				Tersdanya Pedoman IKM																
				Jumlah unit pelayanan yang sudan di IKM	13	13														
	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan ddbdang organisasi, pertengkapan dan keuangan serta administrasi umum			Persentase capaian kinerja Bidang organisasi, pertengkapan dan keuangan serta administrasi umum		83%			83,5%		84,00%		84,50%		85%		85%			
		4.01.03.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		79,99%	81,5%	338.843	82%	325.534	83%	327.076	83,5%	327.354	85%	323.808	85%	1.642.615	Bagian Organisasi	
		4.01.03.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Jumlah Dokumen LKIP, Dokumen Penetapan Kinerja dan Dokumen IKU			3 dok	75.000	3 dok	110.000	3 dok	110.000	3 dok	110.000	3 dok	110.000	3 dok	110.000		
				Dokumen kija, dokumen penelapan kinerja dan dokumen iku			3 dok	75.000	3 dok	110.000	3 dok	110.000	3 dok	110.000	3 dok	110.000	3 dok	110.000		
		4.01.03.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan PD yang tersusun sesuai standar			1 dok	201.343	1 dok	230.804	1 dok	230.804	1 dok	230.804	1 dok	230.804	1 dok	230.804		

492

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja SKPD Penang gung Jawa b	Lokasi
					Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD				
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD sesuai standar			6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok				
				Jasa surat menyurat			12 Bulan	2.400	12 bulan	2.700	12 bulan	2.700	12 bulan	2.700	12 bulan	2.700	12 bulan	2.700			
				Jasa administrasi keuangan			12 Bulan	50.000	12 bulan	50.000	12 bulan	50.000	12 bulan	50.000	12 bulan	50.000	12 bulan	50.000			
				Alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			12 Bulan	33.943	12 bulan	33.104	12 bulan	33.104	12 bulan	33.104	12 bulan	33.104	12 bulan	33.104			
				Makanan dan minuman			12 Bulan	70.000	12 bulan	100.000	12 bulan	100.000	12 bulan	100.000	12 bulan	100.000	12 bulan	100.000			
				rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			12 Bulan	45.000	12 bulan	45.000	12 bulan	45.000	12 bulan	45.000	12 bulan	45.000	12 bulan	45.000			
		4.01.03.07.03		Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur			16 dok	62.500	16 dok	91.500	16 dok	91.500	16 dok	91.500	16 dok	91.500	16 dok	91.500			
				Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan			60 dok		60 dok		60 dok		60 dok		60 dok		60 dok				
				Jumlah ASN yang komplet			15 org		15 org		15 org		15 org		15 org		15 org				
				Jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional, terpeliharanya kendaraan dinas operasional			100%	37.500	12 bulan	35.500	12 bulan	35.500	12 bulan	35.500	12 bulan	35.500	12 bulan	35.500			
				Pengiriman peserta bimtek, workshop			4 orang	10.000	8 orang	25.000	8 orang	25.000	8 orang	25.000	8 orang	25.000	8 orang	25.000			

496

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																					
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)																Unit Kerja SKPD Penanggun Jawaab	Lokasi
					Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD				
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Bentuk implementasi peraturan perundang-undangan			1 kali	15.000	1 kali	30.000	1 kali	30.000	1 kali	30.000	1 kali	30.000	1 kali	30.000			
		4.01.03.42	Program pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi					595.000		571.629		574.337		574.826		568.599		2.884.391	Bagian Organisasi		
				Persentase efektifitas kelembagaan perangkat daerah		80%	85%		88%		90%		95%		100%		100%				
				Indeks kepuasan masyarakat		80%	81,5%		82%		83%		85%		85%		85%				
				Nilai akuntabilitas kinerja		68,19%	70,5%		72,5%		75%		81%		83%		83%				
				Indeks reformasi birokrasi		67,05%	69,17%		74%		79%		85%		90%		90%				
				Cakupan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				

196

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja SKPD Penganggun Jawa	Lokasi
					Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD				
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4.01.03.02.01	Fasilitasi kelembagaan perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang terfasilitasi penataan kelembagaan sesuai peraturan perUlan			3 OPD	350.000	3 OPD	460.000	3 OPD	460.000	3 OPD	460.000	3 OPD	460.000	3 OPD	460.000			
				Jumlah PD yang terfasilitasi penyusunan standar kompetensi jabatan (sk) sesuai ketentuan yang berlaku			5 OPD		7 OPD		7 OPD		7 OPD		7 OPD		7 OPD				
				Jumlah PD yang terfasilitasi penyusunan anjab dan eyab sesuai ketentuan yang berlaku			5 OPD		7 OPD		7 OPD		7 OPD		7 OPD		7 OPD				
				Penataan kelembagaan perangkat daerah			3 OPD	110.000	3 OPD	150.000	3 OPD	150.000	3 OPD	150.000	3 OPD	150.000	3 OPD	150.000			
				Fasilitasi penyusunan standar kompetensi jabatan (sk)			5 OPD	40.000	7 OPD	60.000	7 OPD	60.000	7 OPD	60.000	7 OPD	60.000	7 OPD	60.000			
				Fasilitasi penyusunan anjab dan eyab			5 OPD	200.000	7 OPD	250.000	7 OPD	250.000	7 OPD	250.000	7 OPD	250.000	7 OPD	250.000			
		4.01.03.02.02	Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen ketatalaksanaan yang tersusun			3 dok	225.000	3 dok	235.000	3 dok	235.000	3 dok	235.000	3 dok	235.000	3 dok	235.000			
				Jumlah OPD yang telah difasilitasi pelaksanaan ketatalaksanaan dan pengembangan pelayanan publik			34 OPD		34 OPD		34 OPD		34 OPD		34 OPD		34 OPD				
				Jumlah OPD yang nilai IKMnya dengan kategori baik (A)			6 OPD	40.000	6 OPD	40.000	6 OPD	40.000	6 OPD	40.000	6 OPD	40.000	6 OPD	40.000			

492

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD			
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				dokumen analisis standar belanja (asb)			1 dok	20.000	1 dok	40.000	1 dok	40.000	1 dok	40.000	1 dok	40.000	1 dok	40.000		
				Dokumen standar satuan harga			1 dok	60.000	1 dok	50.000	1 dok	50.000	1 dok	50.000	1 dok	50.000	1 dok	50.000		
				Fasilitasi opd yang di survei kepuasan masyarakat (skm)			10 OPD	80.000	10 opd	80.000	10 opd	80.000	10 opd	80.000	10 opd	80.000	10 opd	80.000		
				Fasilitasi penyelenggaraan inovasi pelayanan publik			34 OPD	25.000	34 OPD	25.000	34 OPD	25.000	34 OPD	25.000	34 OPD	25.000	34 OPD	25.000		
		4.01.03.02.03	Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen bidang akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang tersusun tepat waktu			4 dok	20.000	1 dok	40.000	1 dok	40.000	1 dok	40.000	1 dok	40.000	1 dok	40.000		
		4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan													Bagian Organisasi	
		4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhnya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur																
		4.01.03.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur	5 unit	5 unit														
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	12 bulan															
		4.01.03.04	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah rapat koordinasi pimpinan	11 kali	8 kali														
		4.01.03.05																		

102

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penguat gung Jawa	Lokasi	
					Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD				
1	2	3	4	5	2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	20	21	
		4.01.03.06	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi	1 dok	1 dok															
		4.01.03.07	Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen standar satuan harga	1 dok	1 dok															
		4.01.03.08	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah SKPD yang sudah di Ajiah, ABK		10 OPD															
				Jumlah Perangkat Daerah yang terakreditasi		3 OPD															
				Jumlah Naskah Akademik Perda OPD		1 dok															
				Jumlah Perda/Perbup OPD		1 dok															
				Tersedianya Pedoman IKM																	
				Jumlah unit pelayanan yang sudah di IKM	13	13															
				Persentase capaian kinerja Bidang organisasi, pertengkeapan dan keuangan serta administrasi umum		83%															
		4.01.03.07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		79,99%	81,5%	338.843	82%	325.534	83%	327.076	83,5%	327.354	85%	323.808	85%	1.642.615			

106

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penang gung Jawa b	Lokasi			
					Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019					Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023			Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD		
							2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)	
																							6
1	2	3	4	5																20	21		
		4.01.03.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Jumlah Dokumen LKJP, Dokumen Penetapan Kinerja dan Dokumen IKU			3 dok	75.000															
				Dokumen lkjp, dokumen penetapan kinerja dan dokumen iku			3 dok	75.000															
		4.01.03.07.02	Pelayanan administrasi dan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standar			1 dok	201.343	1 dok	230.804	1 dok	230.804	1 dok	230.804	1 dok	230.804	1 dok	230.804					
				Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD sesuai standar			6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok						
				Jasa surat menyurat			12 Bulan	2.400	12 bulan	2.700	12 bulan	2.700	12 bulan	2.700	12 bulan	2.700	12 bulan	2.700					
				Jasa administrasi keuangan			12 Bulan	50.000	12 bulan	50.000	12 bulan	50.000	12 bulan	50.000	12 bulan	50.000	12 bulan	50.000					
				Alat tulis kantor, barang ceikan dan pengandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			12 Bulan	33.943	12 bulan	33.104	12 bulan	33.104	12 bulan	33.104	12 bulan	33.104	12 bulan	33.104					
				Makanan dan minuman			12 Bulan	70.000	12 bulan	100.000	12 bulan	100.000	12 bulan	100.000	12 bulan	100.000	12 bulan	100.000					
				rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			12 Bulan	45.000	12 bulan	45.000	12 bulan	45.000	12 bulan	45.000	12 bulan	45.000	12 bulan	45.000					
		4.01.03.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuan			16 dok	62.500	16 dok	91.500	16 dok	91.500	16 dok	91.500	16 dok	91.500	16 dok	91.500					
				Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan			60 dok		60 dok		60 dok		60 dok		60 dok		60 dok						
				Jumlah ASN yang kompeten			15 org		15 org		15 org		15 org		15 org		15 org						

492

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja SKPD Penang gung Jawa b	Lokasi		
					Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019					Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023				Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD	
							2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
																			6				
1	2	3	4	5																	20	21	
				Jasa pelatihan dan peningkatan kantor, jasa pembinaan dan pembinaan dinasoperasional, terpeliharanya kendaraan dinasoperasional			100%	37.500	12 bulan	35.500	12 bulan	35.500	12 bulan	35.500	12 bulan	35.500	12 bulan	35.500	12 bulan	35.500			
				Pengiriman peserta bintek, workshop			4 orang	10.000	8 orang	25.000	8 orang	25.000	8 orang	25.000	8 orang	25.000	8 orang	25.000	8 orang	25.000			
				Bintek implementasi peraturan perundang-undangan			1 kali	15.000	1 kali	30.000	1 kali	30.000	1 kali	30.000	1 kali	30.000	1 kali	30.000	1 kali	30.000			
		4.01.03.42	Program pembinaan kelengkapan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi					595.000		571.629		574.337		574.826		568.599		2.884.391	Bagian Organisasi				
				Persentase efektifitas kelengkapan perangkat daerah		80%	85%			88%					90%					100%			
				Indeks kepuasan masyarakat		80%	81,5%			82%					83%					85%			
				Nilai akuntabilitas kinerja		68,19%	70,5%			72,5%					75%					81%			
				Indeks reformasi birokrasi		67,05%	69,17%			74%					79%					90%			

19

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Pengang Jung Jawab	Lokasi
					Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD			
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Cakupan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		4.01.03.02.01	Fasilitasi kelembagaan perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang terfasilitasi penataan kelembagaan sesuai peraturan perUuan			3 OPD	350.000	3 OPD	460.000	3 OPD	460.000	3 OPD	460.000	3 OPD	460.000	3 OPD	460.000		
				Jumlah PD yang terfasilitasi penyusunan standar kompetensi jabatan (skj) sesuai ketentuan yang berlaku			5 OPD		7 OPD		7 OPD		7 OPD		7 OPD		7 OPD			
				Jumlah PD yang terfasilitasi penyusunan anjab dan eyjab sesuai ketentuan yang berlaku			5 OPD		7 OPD		7 OPD		7 OPD		7 OPD		7 OPD			
				Penataan kelembagaan perangkat daerah			3 OPD	110.000	3 OPD	150.000	3 OPD	150.000	3 OPD	150.000	3 OPD	150.000	3 OPD	150.000		
				Fasilitasi penyusunan standar kompetensi jabatan (skj)			5 OPD	40.000	7 OPD	60.000	7 OPD	60.000	7 OPD	60.000	7 OPD	60.000	7 OPD	60.000		
				Fasilitasi penyusunan anjab dan eyjab			5 OPD	200.000	7 OPD	250.000	7 OPD	250.000	7 OPD	250.000	7 OPD	250.000	7 OPD	250.000		
		4.01.03.02.02	Fasilitasi ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen ketatalaksanaan yang tersusun			3 dok	225.000	3 dok	235.000	3 dok	235.000	3 dok	235.000	3 dok	235.000	3 dok	235.000		

1000

[illegible]

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penang gung Jawa b	Lokasi
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5															20	21
	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan dibidang administrasi umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan	4.01.4.01.03.07	Program pelayanan administrasi umum							422.135	422.135		422.135	695.808	695.808		695.808		Bagian Protokol dan Komunikas i Pimpinan	
				Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah						83%		83,50%		84%		85%		85%		
		4.01.4.01.03.07.02	Pelayanan administrasi dan keuangan							101.520		101.520		193.740		193.740		193.740		
				Jumlah dokumen perencanaan, penelausahaan dan pelaporan keuangan yang tersusun						2 dokumen		8 dokumen		8 dokumen		8 dokumen		8 dokumen		
				Tersedianya honorarium PNS dan Non PNS						8 Org		10 Org		12 Org		12 Org		12 Org		
				Tersedianya Uang Lembur PNS dan Non PNS						17 Org		19 Org		25 Org		25 Org		25 Org		
		4.01.4.01.03.07.03	Peningkatan kapasitas sumber deya dan sarana prasarana aparatur							320.615		320.615		502.068		502.068		502.068		

199

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penang gung Jawab	Lokasi
					Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD			
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah alat tulis kantor, listrik dan elektronik, jasa surat menyurat, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, bahan bacaan dan peralatan perundangan, cetak dan penggandaan					81 Jenis		81,00 Jenis		81 Jenis		81 Jenis		81 Jenis			
				Jumlah jasa pengemudi/ driver, tenaga protokol, dan jasa pengelola dokumentasi					7 Org		7 Org		7 Org		7 Org		7 Org			
				Jumlah makanan dan minuman pegawai					25 org		25 org		25 org		25 org		25 org			
				Jumlah perawatan kendaraan bermotor					8 Unit		8 Unit		9 Unit		9 Unit		9 Unit			
				Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga					13 Jenis		13 Jenis		13 Jenis		13 Jenis		13 Jenis			
Mewujudkan peningkatan pelayanan kedinasan KDH/wakil KDH ; KDH	Meningkatnya pelayanan KDH/wakil KDH ;	4.01.4.01.03.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala daerah/ wakil kepala daerah	Persentase kelancaran pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah																
				Penerimaan kunjungan dan pelaksanaan koordinasi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah						190 kali	1.408.029	190 kali	1.408.029	200 kali	2.344.539	220 kali	2.500.000	220 kali	2.500.000	

4
96

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penang gung JawaB	Lokasi
					Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD			
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan koordinasi dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;		4.01.03.19	Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	persentase pengelolaan komunikasi dan informasi publik					100%	323.170	100%	323.170	100%	811.370	100%	811.370	100%	811.370		
		4.01.03.19.03	Fasilitasi Komunikasi dan Informasi Pimpinan Daerah	Jumlah jasa pengharagaan (plakat lambang daerah)					100 buah		100 buah		100 buah		100 buah		100 buah	87.000		
				Jumlah belanja cetak untuk kebutuhan keprotokolan					10 jenis		10 jenis		12 jenis		12 jenis		12 jenis	91.050		
				Jumlah karangan bunga					116 buah		116 buah		120 buah		120 buah		120 buah	274.000		
				Jumlah fasilitas komunikasi (rapat pimpinan), coffee morning pimpinan dan insan media					20 kali		20 kali		20 kali		20 kali		20 kali	105.875		
				Jumlah publikasi media cetak					5.000 mmk		5.000 mmk		7500 mmk		7500 mmk		7500 mmk	178.445		
				Publikasi media elektronik					1 kali		1 kali		3 kali		3 kali		3 kali	75.000		
		4.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat																
		4.01.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik																
		4.01.03.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor																
		4.01.03.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Asuransi Rumah Dinas																

496

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja SKPD Pengung Jawa	Lokasi
					Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD				
1	2	3	4	5	2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	20	21	
		4.01.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional																	
		4.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Uang lembur PNS dan Non PNS, serta Premi Asuransi																	
		4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat tulis kantor																	
		4.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan																	
		4.01.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
		4.01.03.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Pengisian Tabung Gas, Bahan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga																	
		4.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																	
		4.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati																	

Y f a

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja SKPD Penang gung Jawa b	Lokasi
					Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD				
							2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Perijanan Dinas, Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah																	
		4.01.03.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur																	
			Pengadaan mobil Jabatan	Tersedianya Mobil Dinas																	
			Pengadaan Kendaran Dinas/Operasio nial	Tersedianya kendaraan Dinas/Operasional																	
		4.01.03.02.06	Pengadaan perlengkapan rumah Jabat/dinas	Tersedianya Bahan Peralatan dan Perlengkapan																	
		4.01.03.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung Kantor	Tersedianya bahan peralatan dan perlengkapan																	
		4.01.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung Kantor																	
		4.01.03.02.10	Pengadaan mebel/ur	Pengadaan Mebel/ur untuk Rumah Dinas Bupati																	
		4.01.03.02.12	Pembangunan bangunan pelengkap gedung Kantor	Tersedianya bangunan pelengkap gedung Kantor																	
		4.01.03.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas																	
		4.01.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor																	

18

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																						
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan			Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penang gung Jawa b	Lokasi	
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target			Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bupati, Wabup, Sekda, Staf Ahli, Assisten Sekda dan Bag Umum Seida																		
		4.01.03.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor, peralatan dan meubeleur																		
		4.01.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan Gedung Kantor																		
		4.01.03.03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Pakaian dinas beserta perlengkapan untuk bupati dan wabup, ajudan bupati/ wabup dan protokol																		
		4.01.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan ya	Tersedianya Pakaian dinas beserta perlengkapan untuk Bupati dan Wabup, Ajudan Bupati/ Wabup dan Protokol																		
	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan dibidang organisasi, peningkatan dan keuangan serta administrasi umum	4.01.03.1.00.07	Program Pelayanan Administrasi umum	Persentase capaian kinerja Bidang organisasi, pertongkapan dan keuangan serta administrasi umum	83%		83,5%		84,00%		84,50%		85%		85%		85%		52.215.937	Bagian Umum		
		4.01.03.1.00.07	Program Pelayanan Administrasi umum		100%		100%	9.946.114	100%	10.555.449	100%	10.600.703	100%	10.608.878	100%	10.504.793	100%	52.215.937	Bagian Umum			

406

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																						
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penang Gung JawaB	Lokasi		
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		1.00.4.01.03.07	Pelayanan Administrasi dan pelaporan Keuangan	Tersedianya dokumen kepegawaian, perencanaan dan pelaporan keuangan yang sesuai standar			19 Dok	1.535.004	19 Dok	1.535.004	19 Dok	1.535.004	19 Dok	1.535.004	19 Dok	1.535.004	19 Dok	7.675.020				
				Tersedianya Honorarium PNS dan Non PNS serta Honorarium Tim Pengabdian Barang Jasa			28 org		25 org		25 org		25 org		25 org		25 org					
				Tersedianya uang lembur PNS dan Non PNS			50 org		47 org		47 org		47 org		47 org		47 org					
		1.00.4.01.03.07	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Tersedianya ASN/Non ASN dan outsourcing yang kompeten			69 org	8.411.110	74 org	9.020.445	74 org	9.065.699	74 org	9.073.874	74 org	8.969.789	74 org	44.540.917				
				Tersedianya pengelolaan rumah dinas			3 buah		3 buah		3 buah		3 buah		3 buah		3 buah					
				Tersedianya pengelolaan kendaraan bermotor			68 unit		71 unit		71 unit		71 unit		71 unit		71 unit					
		4.01.03.4.01.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase kelancaran pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah			100%	2.029.144	100%	2.449.443	100%	2.458.676	100%	2.460.343	100%	2.439.108	100%	11.836.714	Bagian Umum			
		4.01.4.01.03.16	Penerimaan Kunjungan dan Pelaksanaan Koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Tersedianya fasilitas kunjungan kerja / tamu yang diterima KDH dan wakil KDH			30.826 orang	2.029.144 orang	30.826 orang	2.449.443 orang	30.826 orang	2.458.676 orang	30.826 orang	2.460.343 orang	30.826 orang	2.439.108 orang	30.826 orang	11.836.714				

1
B
K

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Unit Kerja SKPD Penang gung Jawab	Lokasi
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD				
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Terlaksananya fasilitas kegiatan protokol KDH/Wakil KDH yang mewakili			2.500 kali		2.500 kali		2.500 kali		2.500 kali		2.500 kali		2.500 kali				
Peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana dibiidang organisasi, koordinasi serta terciptanya manajemen yang profesional	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan organisasi, koordinasi dan keuangan serta administrasi umum			Persentase capaian kinerja bidang organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan serta administrasi umum			83,5%		84,00%		84,50%		85%		85%						
		4.01.4.01.03.07	Program Pelayanan Administrasi Umum	Persentase Kelancaran Pelayanan Kedinasaan Sekretariat Daerah																	
		4.01.4.01.03.07	Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penalausahaan dan Pelaporan keuangan			189 Dok			575.360	189 Dok		605.953	189 Dok		700.000	189 Dok		770.000	756 Dok	2.651.313
		4.01.4.01.03.07	Peningkatan Kapasitas sumber Daya dan Sarana Prasarana Aparatur	Jumlah Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Bahan Material			8 Jenis			28.079.005	8 Jenis		8.925.517	8 Jenis		19.065.699	8 Jenis		20.972.269	32 Dok	77.042.491
				Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Aparatur Kantor			31 Jenis				31 Jenis			31 Jenis			31 Jenis			31 Jenis	
				Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor			53 Jenis				53 Jenis			53 Jenis			53 Jenis			53 Jenis	

492

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD				
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kantor Bupati					7 Paket		7 Paket		7 Paket		7 Paket		28 Paket				
		4.01.4.01.03.07.01	Pelayanan Ketatausahaan Umum dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengelolaan Umum dan Kepegawaian yang tersusun sesuai Standar					17 Dok	1.230.664	17 Dok	1.177.602	17 Dok	1.500.000	17 Dok	1.850.000	68 Dok	5.558.266			
				Jumlah ASN dan PHD yang mendapatkan Honor dan Uang Lembur					29 Orang		29 Orang		29 Orang		29 Orang		29 Orang				
				Jumlah Jenis Belanja Barang Jasa yang Tersedia (ATK, Surat Kabar/Majalah, jasa Pengiriman, Premi Asuransi Kesehatan, Cetak, Perjalanan Dinas dan Kursus/Diklat)					7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis				
				Jumlah Buku Ilmu Sosial					29 Buah		29 Buah		29 Buah		29 Buah		116 Buah				
			Program Pelayanan Administrasi Umum		86.11	85.5															
			Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	90.09	90															
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.92	85															

196

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Unit Kerja SKPD Penang gung Jawa b	Lokasi				
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019			Tahun-2 2020			Tahun-3 2021			Tahun-4 2022			Tahun-5 2023			Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD			
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target			Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	57.59	70																			
				Tersedianya Alat Tulis Kantor	95.81	95																			
				Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	82.25	80																			
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	96.11	95																			
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100	100																			
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Per Uu an	75.02	80																			
				Tersedianya Makanan dan Minuman	70.86	75																			
				Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	80.47	85																			
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		91.47	92																			
				Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	96.86	95																			
				Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	92.05	95																			
				Tersedianya Mebelur	96.16	98																			
				Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	75.7	80																			

SPK

[illegible]

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan		Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5 Jumlah jasa asuransi kebakaran gedung kantor di Lingkungan Kantor Bupati Kudus yang tersedia	6	7	8 3 Unit	9	10 3 Unit	11	12 3 Unit	13	14 3 Unit	15	16 3 Unit	17	18 3 Unit	19	20	21
				Jumlah mobil dinas Kepala Bagian pada Selda yang tersedia			44 unit		44 unit		44 unit		44 unit		44 unit		44 unit			
				Jumlah Sepeda Motor pada Selda yang tersedia			37 unit		37 unit		37 unit		37 unit		37 unit		37 unit			
				Jumlah Pembangunan mushola dan penataan bangunan di lingkungan kantor Bupati Kudus, jasa konsultasi pengawasan teknis yang terlaksana			2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit			
				Tersedianya Dokumen Pencatatan dan Pelaporan Aset yang Sesuai Standar			48 Dok		48 Dok		48 Dok		48 Dok		48 Dok		48 Dok			

492

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kudus disajikan pada tabel 7.1

4/12

Tabel 7.1

Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

No	IKU Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Nilai SAKIP		68,19	70,50	72,50	75,00	81,00	83,00	83,00	
2.	Nilai LPPD	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	
3.	Angka Inflasi Daerah	4,17	3,11	3.5 +/- 1%	3.5 +/- 1%	3.5 +/- 1%	3.5 +/- 1%	3.5 +/- 1%	3.5 +/- 1%	
4.	Indeks reformasi birokrasi		67,05	69,17	74	79	85	90	90	
5.	Persentase capaian kinerja bidang pemerintahan dan kesra	-	-	80%	80,5%	81%	81,5 %	82%	82%	
6.	Persentase capaian kinerja bidang perekonomian dan pembangunan	-	-	80%	80,5%	81%	81,5 %	82%	82%	
7.	Persentase capaian kinerja bidang organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan serta administrasi umum	-	-	83%	83,5%	84%	84,5%	85%	85%	

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun							Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		80%	81,5%	82%	83%	83,5%	85%	85% (Bagian Pemerintahan)		
2.	Persentase fasilitasi pemerintahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
3.	Persentase fasilitasi kerjasama		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4.	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		83,37%	83,5%	84%	84,5%	85,0%	85,5%	85,5% (Bagian Hukum)		
5.	Persentase penataan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyelesaian penanganan kasus penda		87%	85%	87%	88%	89%	90%	90%		
6.	Persentase peningkatan produk hukum daerah yang diinformasikan		87%	95%	95%	96%	97%	97%	97%		
7.	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		80%	81,5%	82%	83%	83,5%	85%	85% (Bagian Kesra)		
8.	Persentase fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial dan masyarakat dan kegiatan keagamaan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
9.	Persentase fasilitasi penyaluran zakat, infak, sodagoh		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
10.	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		80%	81,5%	82%	83%	83,5%	85%	85% (Bagian Perkonomian)		

f 10

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11.	Angka Inflasi Daerah		3,11%	3,5% ± 1	3,5% ± 1	3,5% ± 1	3,5% ± 1	3,5% ± 1	3,5% ± 1	
12.	Persentase Kenaikan Kontribusi Laba BUMD terhadap PAD		11,69%	5%	6%	7%	8%	9%	35%	
13.	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		80%	81,5%	82%	83%	83,5%	85%	85% (Bagian Administrasi Pembangunan)	
14.	Persentase Realisasi Kegiatan Pembangunan yang tepat waktu		86%	88%	88,5%	89%	90%	90%	90%	
15.	Persentase penyusunan program pembangunan yang tepat waktu				88,5%	89%	90%	90%	90%	
16.	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		80%	81,5%	82%	83%	83,5%	85%	85% (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	
17.	Persentase fasilitasi proses pengadaan barang/jasa sesuai standar pelayanan		80,79%	86,28%	87%	87%	90%	95%	95%	
18.	Persentase fasilitasi proses pengadaan barang/jasa secara elektronik sesuai standar pelayanan		-		87%	87%	90%	90%	92%	
19.	Persentase peserta sosialisasi yang memahami tentang aturan/ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa		-	-	85%	85%	87%	90%	90%	

746

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2017	Target Capaian Tahun 2018	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2019	Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		3	4	5	2020	2021	2022	2023	10	
1	2									
20.	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		79,99%	81,5%	82%	83%	83,5%	85%	85% (Bagian Organisasi)	
21.	Persentase efektivitas kelembagaan perangkat daerah		80%	85%	88%	90%	95%	100%	100%	
22.	Indeks Kepuasan Masyarakat		80%	81,5%	82%	83%	83,5%	85%	85%	
23.	Nilai akuntabilitas kinerja		68,19	70,50	72,50	75,00	81,00	83,00	83,00	
24.	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten		67,05%	69,17%	74%	79%	85%	90%	90%	
25.	Cakupan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
26.	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		80%	81,5%	82%	83%	83,5%	85%	85% (Bagian Umum)	
27.	Persentase kelancaran pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
28.	Persentase kelancaran pelayanan kedinasan Setda		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
29.	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah				83%	83,5%	84%	85%	85% (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan)	

18

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2017	Target Capaian Tahun 2018	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2019	Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		3	4	5	2020	2021	2022	2023	10	
30.	Prosentase Fasilitasi Pelayanan Keprotokolan				85%	86%	87%	88%	88%	
31.	Prosentase Fasilitasi komunikasi dan dokumentasi kegiatan Pimpinan Daerah				85%	86%	87%	88%	88%	

88%

BAB VIII PENUTUP

Dengan dirumuskannya Perubahan Rencana Strategis (Renstra), Sekretariat Daerah berupaya seoptimal mungkin mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kudus melalui proses penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja dari pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur dari sistem akuntabilitas kinerja.

Sekretariat Daerah akan mengantisipasi perkembangan di masa depan dengan berorientasi pada hasil yang dicapai kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul.

Pada akhirnya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 diharapkan menjadi pedoman dan acuan serta dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Sekretariat Daerah. Dengan begitu Sekretariat Daerah mampu memberikan daya dukung, baik dalam mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain, dan yang utama memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS BIDANG	
4.	KEPALA BAGIAN/KANTOR/BIDANG	
5.	BAGIAN HUKUM	

Kudus, 2019

Sekretaris Daerah



Dr. Ars. SAM'ANI INTAKORIS, ST, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19690721 199703 1 005

Plt BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,

HARTOPO